

Isti Fajaroh
Eko Murdiyanto
Budiarto

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS URBAN FARMING

Isti Fajaroh, dkk

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS URBAN FARMING

Pemanfaatan lahan untuk permukiman di kota membawa beragam permasalahan seperti kemiskinan, permukiman kumuh dan tidak tersedianya ruang terbuka hijau yang dimiliki secara komunal, sehingga hanya bisa mengandalkan milik individu. Ketersediaan ruang terbuka hijau privat dapat dilakukan kegiatan urban farming. Masyarakat bisa mengusahakan sayuran untuk dikonsumsi, masyarakat dapat berinteraksi bersama dan menumbuhkan gotong royong di masyarakat.

Kegiatan masyarakat melalui urban farmin dapat menjadi alternatif untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di perkotaan agar tercipta masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Kemandirian dalam masyarakat akan tercipta jika masyarakat mampu memanfaatkan segenap potensi atau sumber daya yang ada disekitarnya melalui kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas diri masyarakat, meningkatkan tanggung jawab kolektif masyarakat dan meningkatkan kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan.



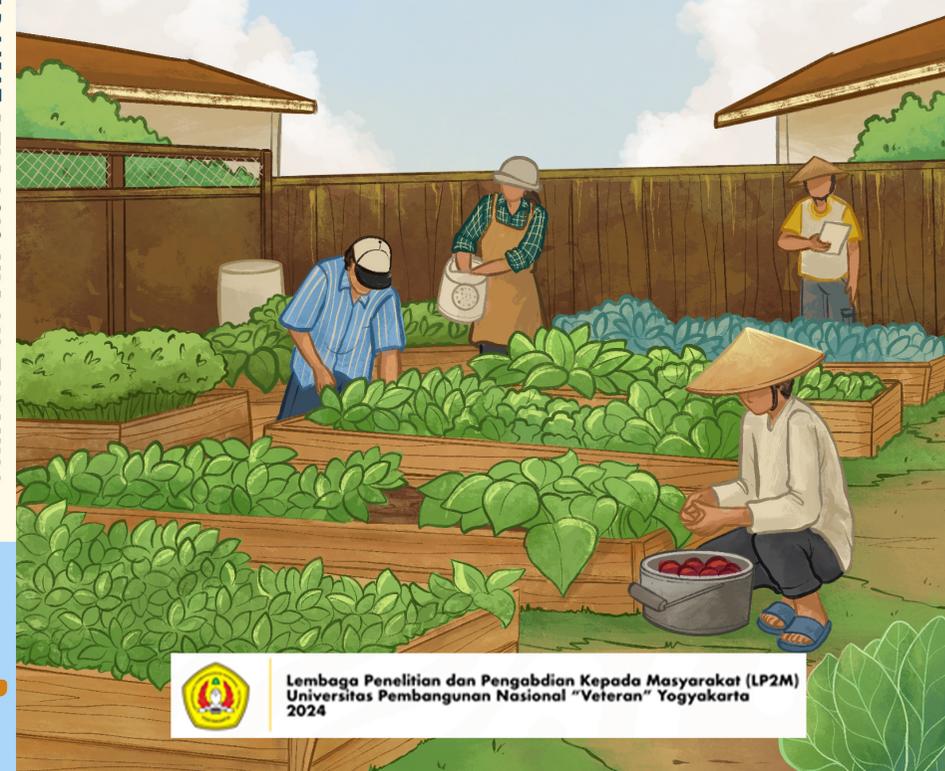
Isti Fajaroh, Lahir di Sleman, 19 Mei 1979. Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Memperoleh gelar SP dari Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2000), dan gelar M.M.A dalam Magister Agribisnis Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta (2022). Aktif melakukan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat lingkup Perekonomian dan Pembangunan.



Eko Murdiyanto, Lahir di Yogyakarta, 6 Maret 1970. Staf Pengajar Jurusan Agribisnis, Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta. Memperoleh gelar SP dari Sosek Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta (1995); gelar M.Si. dalam Sosiologi Perdesaan dari IPB Bogor (2001), dan gelar Dr dalam Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat dari UNS Surakarta (2017). Aktif meneliti dan menulis tentang Sosiologi Perdesaan, UMKM, Monitoring dan Evaluasi, Perubahan Sosial, Komunikasi dan informasi Pertanian, dan Pemberdayaan Masyarakat.



Budiarto, Lahir di Magelang 18 April 1962. Staf Pengajar pada Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta, mendapat gelar Ir. dari Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta (1986); gelar Magister Pertanian (M.P.) dari Ekonomi Pertanian UGM Yogyakarta (1996) dan gelar Dr. dalam Ilmu-Ilmu Pertanian di UGM Yogyakarta. Aktif menulis artikel di berbagai Jurnal Ilmiah dan Penelitian terkait Sosial Ekonomi Pertanian



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERBASIS URBAN FARMING**

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf l, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS URBAN FARMING

Isti Fajaroh
Eko Murdiyanto
Budiarto

diomedia 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS URBAN FARMING

Hak Cipta © Isti Fajaroh, Eko Murdiyanto, Budiarto, 2024

Penulis: Isti Fajaroh, Eko Murdiyanto, Budiarto

Editor: Ngadiyo

Penata letak: goodteadesign

Perancang sampul: Ghoffar I. Ammar

Ilustrasi isi: Freepik

Cetakan pertama, Desember 2024

xxiv + 136 hal, 14 x 20 cm

ISBN 978-623-8228-74-4

Penerbit:

CV. Diomedia

Redaksi dan Pemasaran:

PENERBIT DIOMEDIA

Perum Griya Kartika Blok D-3 Pucangan Kartasura Sukoharjo Solo

email: pustakadiomedia@gmail.com

Telp: 085643762005

www.diomedia.id

Bekerja sama dengan

WIMAYA PRESS

UPN "Veteran" Yogyakarta

Badan Usaha Universitas (BUU)

Jl SWK 104 (Lingkar Utara), Condongcatur Yogyakarta. 55283

Telp/Fac: (0274) 489027

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan masyarakat memiliki sejarah yang sangat panjang dan mengalami pasang surut karena menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan fasilitator sebagai pihak yang memberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan peluang berusaha yang sesuai bagi masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha berdasar kondisi wilayah sehingga dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Masyarakat perkotaan dengan kondisi penduduk yang padat, akan membawa beragam permasalahan terutama pada keterbatasan lahan untuk melakukan usaha di bidang pertanian. Keterbatasan lahan ini hanya bisa tercukupi di pekarangan warga dan lahan tidak produktif. Salah satu bentuk pemanfaatan lahan sempit adalah dengan melakukan *urban farming*.

Pemanfaatan lahan sempit dan tidak produktif untuk penanaman tanaman pangan terutama sayuran untuk dikonsumsi keluarga sebagai ujung tombak ketahanan pangan keluarga. Selain itu masyarakat perkotaan yang cenderung tidak saling mengenal satu sama lain, dengan adanya kegiatan *urban farming* akan berinteraksi dan melakukan kegiatan bersama-

sama. Inilah awal suatu proses dimana pemberdayaan bisa dimulai dari kegiatan ini, dimulai dari *urban farming*. Oleh karena itu sangat diperlukan komitmen pengelola *urban farming* dan pemangku wilayah untuk pelaksanaan *urban farming* dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta dibutuhkan contoh dan kegiatan yang nyata yang dapat dirasakan warga manfaatnya agar berkelanjutan.

Buku ini mencoba untuk melihat permasalahan lahan yang sempit di perkotaan namun dapat dimanfaatkan sebagai “pabrik” tanaman pangan, terutama sayuran melalui *urban farming*. Pengelolaan *urban farming* yang memerlukan komitmen kuat agar berkelanjutan ternyata lebih cocok dilakukan oleh ibu-ibu atau wanita tani yang tergabung dalam kelompok wanita tani. Selain karena tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga pengolahan lahannya sangat minim, *urban farming* sangat cocok dengan karakter ibu-ibu yang mudah dan suka berinteraksi, “*nggrumpi*” dan “*guyub*”. Oleh karena itu tidaklah keliru apabila pengembangan *urban farming* ini diletakkan di pundak ibu-ibu wanita tani sebagai langkah untuk memberdayakan wanita di perkotaan.

Pada akhirnya puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat-Nya kepada penulis sehingga buku ini dapat tersaji dihadapan para pembaca sekalian. Semoga buku ini memberi manfaat kepada akademisi, praktisi dan peminat pemberdayaan masyarakat terutama bagi pemberdayaan masyarakat kota yang mengalami kendala sempitnya lahan. Buku ini masih sangat jauh dari kata sempurna,

oleh karena itu tegur sapa untuk penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan.

Isti Fajaroh

Eko Murdiyanto

Budiarto

PENGANTAR KAPRODI MAGISTER AGRIBISNIS UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Urban Farming ini dapat terselesaikan. Sebagai Kaprodi Magister Agribisnis UPN “Veteran” Yogyakarta merasa bangga dan mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang sudah menyelesaikan buku ini.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan topik yang menarik di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang semakin berkembang, serta akan menjadi kunci untuk menciptakan perubahan positif menuju masyarakat yang sejahtera. Buku ini mencoba untuk melihat permasalahan lahan yang sempit di perkotaan namun seperti yang disampaikan penulis lahan sempit tersebut dapat dimanfaatkan sebagai “pabrik” tanaman pangan, terutama sayuran, dengan melibatkan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani melalui kegiatan yang berbasis *urban farming*. Buku ini diharapkan dapat membuka wawasan terkait pemberdayaan masyarakat dan *urban farming* sehingga menjadi rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Akhir kata terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, dengan harapan semoga keberadaan buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat dan memotivasi penulis-penulis lain dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dr. Wulandari Dwi Etika Rini, SP., MP

PENGANTAR DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

Kehadiran buku berjudul pemberdayaan masyarakat berbasis urban farming memberikan sisi yang lain dari proses pemberdayaan. Saya memberi catatan yang penting dari bagian proses berlangsungnya pemberdayaan masyarakat yaitu adanya peran penting agen pendampingan dan fasilitator. Salah satu prinsip dalam pencapaian keberhasilan suatu proses pemberdayaan masyarakat adalah keberkelanjutan.

Keberhasilan sebuah program pemberdayaan masyarakat ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mendefinisikan potensinya (sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sosial budaya) dan kebutuhan untuk hidup secara mandiri dan terhormat. Untuk dapat mendefinisikan potensi dan kebutuhannya dibutuhkan momentum masyarakat untuk tergugah kesadaran dan kemauannya. Keberadaan pendamping dan fasilitator yang mampu mendorong munculnya pengetahuan masyarakat, menyadari adanya problem Bersama di masyarakat untuk berubah lebih baik, mampu mencari solusi, dan mampu memperjuangkannya untuk menjadi perjuangan individu, kelompok, dan ekosistem dalam masyarakat. Dengan tahapan tersebut, program pemberdayaan akan berjalan dengan

lebih mengakar dan tumbuh berkelanjutan karena ide datang dari masyarakat itu sendiri.

Keberlangsungan pemberdayaan masyarakat dengan urban farming pada KWT Srikandi dimediasi dengan adanya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah kalurahan dan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman dan selanjutnya KWT Srikandi mampu memfasilitasi masyarakat secara luas untuk terlibat dalam kegiatan urban farming. Model fasilitasi dan pendampingan yang berlangsung berjenjang dan berkesinambungan telah memberikan hasil yang sangat bagus, diantaranya pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman sayuran dan obat, budidaya ikan lele dan ikan nila, bertenak ayam jawa super dan sebagainya, bahkan berkembang dengan adanya peningkatan gizi balita dan lansia, program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

KWT Srikandi memiliki visi yang unik tetapi menginspirasi bagi anggota dan masyarakatnya dan keberhasilannya merupakan contoh nyata dari suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil. Masyarakat mampu melakukan pengembangan potensi diri untuk mandiri dan itu tidak terlepas peran dari para pendamping dan siapapun yang telah menjadi fasilitator untuk memberikan fasillitasi masyarakat untuk tumbuh berkembang secara mandiri berdasarkan pada potensi diri.

Dr. Budi Widayanto

PENGANTAR PANEWU DEPOK

Isue ketahanan pangan diperkotaan merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus segera diatasi, khususnya bagi negara yang penduduknya tinggi dan bersamaan dengan perkembangan kota yang semakin pesat seperti di Indonesia. Saat ini perkotaan cenderung menjadi konsumen sementara desa selalu menjadi tumpuan kota untuk memproduksi dan menyediakan sumber pangan. Namun kemampuan desa untuk menyediakan sumber pangan terus terdesak oleh ekspansi perkembangan perkotaan. Di satu sisi wilayah perkotaan memiliki kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Pertanian kota [*urban farming*] dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi tapi tidak untuk menghilangkan ketergantungan perkotaan terhadap perdesaan. Wilayah perkotaan harus serius dalam menggarap pertanian perkotaan, tidak ada lagi pembiaran terhadap lahan tidur, semaksimal mungkin harus dimanfaatkan.

Saat ini wilayah Kapanewon Depok, yang merupakan wilayah perkotaan di Kabupaten Sleman telah mulai melaksanakan upaya pertanian perkotaan sebagai upaya memanfaatkan lahan tidur sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di perkotaan. Pelaksanaan pertanian perkotaan di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dilakukan dengan metode pemberdayaan masyarakat.

Saya menyambut dengan penuh kebahagiaan dan apresiasi kepada Ibu Dr. Wulandari Dwi Etika, SP, MP selaku Koordinator Program Studi Magister Agribisnis UPN “Veteran” Yogyakarta, Dr. Budi Widayanto selaku Dekan Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta, dan sahabat sahabat saya: Bpk. Dr. Eko Murdiyanto., SP,MSi., Bpk. Dr. Ir. Budiarto, MP dan Ibu Isti Fajaroh, SP.MMA. [Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Depok, Alumni UPN “Veteran” Yogyakarta] yang berkenan memberikan kontribusi berharga melalui penerbitan buku yang berjudul : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Urban Farming*. Buku yang berisi tulisan buah pikir para ahli di bidang pertanian dari UPN “Veteran” Yogyakarta tersebut sangat bermanfaat bagi kami sebagai pengampu di wilayah Depok yang merupakan wilayah perkotaan sebagai panduan untuk mengurangi ketergantungan ketersediaan pangan perkotaan kepada wilayah perdesaan tetapi juga diharapkan menjadi panduan pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayah perkotaan.

Akhirnya kami mengucapkan penghargaan dan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada pimpinan UPN “Veteran” Yogyakarta dan para kontributor penulis, semoga memberi inspirasi bagi banyak orang.

Sleman, 14 Oktober 2024

Panewu Depok
Wawan Widiartoro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v	
PENGANTAR KAPRODI MAGISTER AGRIBISNIS UPN “VETERAN” YOGYAKARTA	ix	
PENGANTAR DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UPN “VETERAN” YOGYAKARTA	xi	
PENGANTAR PANEWU DEPOK	xiii	
DAFTAR ISI	xv	
DAFTAR TABEL	xix	
DAFTAR GAMBAR	xxi	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	a. Karakteristik wilayah urban	4
	b. Permasalahan wilayah urban	6
	c. Gambaran umum Padukuhan Mrican	7
BAB II	URBAN FARMING	11
	a. Definisi <i>Urban Farming</i>	13
	b. Manfaat <i>Urban Farming</i>	15
	c. Metode <i>Urban Farming</i>	16
	d. Kendala dan Tantangan <i>Urban Farming</i>	18
	e. <i>Urban farming</i> di Padukuhan Mrican	21

BAB III	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23
	a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat	25
	b. Proses Pemberdayaan Masyarakat	30
	c. Pemberdayaan Sebagai Proses	33
	d. Prinsip -Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	35
	e. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	38
	f. Lingkup dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	40
	g. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	43
	h. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat	44
	i. Penerima Manfaat dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	45
	j. Indikator Keberdayaan Masyarakat	47
BAB IV	PEMANGKU KEPENTINGAN	49
	a. Definisi <i>Stakeholder</i>	52
	b. Klasifikasi Pemangku Kepentingan	53
	c. Peran <i>Stakeholders</i>	54
	d. Pemetaan <i>Stakeholder (stakeholder mapping)</i>	54
	e. Metode Analisis Stakeholder	55
BAB V	PEMBERDAYAAN MELALUI URBAN FARMING PADA KELOMPOK WANITA TANI SRIKANDI	59
	a. Profil Kelompok Wanita Tani Srikandi	61

b. <i>Urban Farming</i> oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi	64
c. <i>Urban Farming</i> di Padukuhan Mrican	75
d. Peran <i>Stakeholder</i> dalam <i>urban farming</i> oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi	94
e. Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui <i>urban farming</i> oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi	104
DAFTAR PUSTAKA	129
TENTANG PENULIS	135

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1.	Pemetaan pelaksanaan <i>urban farming</i> di Padukuhan Mrican	84
Tabel 5.2.	Pelaksanaan <i>urban farming</i> di masyarakat oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi	90
Tabel 5.3.	Peran Stakeholder dalam <i>urban farming</i> Kelompok Wanita Tani Srikandi di Padukuhan Mrican	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Padukuhan Mrican Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok	8
Gambar 3.1.	Tahapan Pemberdayaan	31
Gambar 4.1.	Matriks Kepentingan-Pengaruh (<i>interest- influence matrix</i>)	57
Gambar 5.1.	Bagan Struktur Organisasi Kelompok Wanita Tani Srikandi	63
Gambar 5.2.	Rumah Bibit Kelompok Wanita Tani Srikandi	68
Gambar 5.3.	Proses pembuatan bibit di Rumah Bibit	68
Gambar 5.4.	Lahan sebelum dimanfaatkan untuk Demplot	69
Gambar 5.5.	Pengembangan Demplot KWT Srikandi	70
Gambar 5.6.	Pemanfaatan pekarangan untuk bertanam sayuran	72
Gambar 5.7.	Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terbatas antar RW	73
Gambar 5.8.	Kegiatan Panen Pekarangan pangan Lestari serentak Nasional di KWT Srikandi	74
Gambar 5.9.	Penyerahan Penghargaan APN 2021 KWT Srikandi tahun 2021	75
Gambar 5.10.	Pemanfaatan atap rumah untuk lokasi <i>urban farming</i>	77

Gambar 5.11.	Pemanfaatan gang jalan untuk <i>urban farming</i>	78
Gambar 5.12.	Pemanfaatan lahan di bantaran Sungai Pelang	81
Gambar 5.13.	Demplot Kawasan Rumah Pangan Iestari KWT Srikandi	83
Gambar 5.14.	Penanaman tanaman sayuran di pekarangan anggota KWT Srikandi	83
Gambar 5.15.	Pendampingan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan	94
Gambar 5.16.	Pendampingan dari Dinas Pertanian Pangan dan perikanan Sleman	95
Gambar 5.17	Pendampingan dari Pemerintah Kalurahan Caturtunggal	96
Gambar 5.18.	Anggota KWT Srikandi dengan Stakeholder pendamping kegiatan	97
Gambar 5.19.	Pemenang lomba pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW	106
Gambar 5.20.	Pelatihan Pembuatan Media Tanam bagi KWT Srikandi	109
Gambar 5.21.	Pelatihan olahan hasil pertanian di KWT Srikandi	111
Gambar 5.22.	Pelatihan Pengolahan Limbah di Padukuhan Mrican	112
Gambar 5.23.	Laporan penanaman pekarangan rumah warga	118

Gambar 5.24. Program Kerja Kelompok Wanita Tani Tahun 2022	119
Gambar 5.25. Kegiatan <i>urban farming</i> Kelompok Wanita Tani Srikandi Bulan Maret-April 2022	119
Gambar 4.26. Data Jenis tanaman dan panen tahun 2022	120

BABI

PENDAHULUAN



Meningkatnya kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan menyebabkan semakin tingginya perpindahan penduduk dari desa ke kota (*urbanisasi*). Perpindahan penduduk desa ke kota, selain karena faktor daya tarik kota, juga bisa disebabkan oleh dorongan kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja perdesaan. Perdesaan tidak lagi dapat memberikan sumber penghidupan, penduduk pedesaan pindah ke kota dengan harapan dapat menemukan sumber penghidupan yang baru. Kondisi ini menyebabkan hampir semua lahan dimanfaatkan untuk hunian dan meningkatkan penggunaan lahan kota sebagai lahan ekonomi produktif. Lahan sebagai fungsi lindung (hutan kota, hutan lindung, sempadan sungai) semakin berkurang atau semakin tidak diprioritaskan dan mengakibatkan tidak tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) karena keterbatasan lahan.

Beberapa ahli sosiologi sepakat bahwa lingkungan tempat tinggal dengan ukuran berbeda memiliki cara hidup yang berbeda dan ketiganya menunjukkan ide mengenai kontras

antara cara hidup perdesaan dan perkotaan. Hal itu berkait dengan konsep Durkheim mengenai solidaritas mekanis dan organis, serta ide Tonnies mengenai komunitas dan masyarakat, sehingga perlu adanya pemahaman mengenai karakteristik wilayah urban.

a. Karakteristik wilayah urban

Karakteristik wilayah urban dapat dilacak dari adanya urbanisme dalam suatu wilayah. Ciri yang muncul merujuk pada bentuk-bentuk kebudayaan, pola pikir, dan aktivitas sehari-hari yang menjadi ciri khas masyarakat itu sendiri. Dalam kajian Sosiologi perkotaan, Simmel dalam esainya yang berjudul *The Metropolis and Mental Life* (Gottdiener dan Hutchison, 2011), mencatat delapan karakteristik mengenai urbanisme yang terjadi pada masyarakat urban, yaitu:

1. sikap masa bodoh, *cuek (blasé attitude)*, yang muncul pada masyarakat perkotaan. Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat kota kurang memiliki rasa kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
2. Kuantitas waktu bekerja buruh mengalami peningkatan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya agar perekonomian kota tetap dapat berjalan lancar.
3. Pertukaran/perputaran uang yang memperlancar arus perekonomian. Hal ini berkaitan dengan konsep filosofi uang.

4. Munculnya penyediaan barang produksi secara massal untuk dijual kepada pembeli yang tidak diketahui produsen barang tersebut.
5. Munculnya bentuk pemajangan terhadap barang konsumsi yang akan dibeli masyarakat.
6. Munculnya kalkulasi rasional dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Adapun kalkulasi rasional tersebut sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat perkotaan.
7. Lingkungan menjadi fokus kedua di dalam pembangunan kota setelah terciptanya industri yang mampu memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks.
8. Adanya pembebasan dari pembatasan masyarakat tradisional terkait waktu kerja yang dapat memicu karakteristik individualistis yang melekat dalam kehidupan masyarakat kota.

Menurut simmel, personalitas yang khas diatas disebut dengan dominasi rasionalitas ekonomis dan keagamaan hidup dalam populasi yang besar. Park dan Wirth memberi tambahan pada perhatian terhadap personalitas tersebut dalam kaitannya dengan hubungan sosial. Bagi keduanya, urbanisme meliputi hubungan impersonal, temporer, terpisah-pisah, serta munculnya hubungan “sekunder” asosiatif yang mengorbankan hubungan primer didalam keluarga. Keduanya juga menandai urbanisme dengan ukuran populasi demografis, kepadatan, dan heterogenitas.

b. Permasalahan wilayah urban

Menurut Tjiptoherijanto (2007), meningkatnya proses urbanisasi tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan perkotaan, diantaranya kebijakan ekonomi makro (1967-1980) di mana kota sebagai pusat ekonomi, kombinasi antara kebijaksanaan substitusi impor dan investasi asing di sektor perpabrikasi (*manufacturing*) yang justru memicu polarisasi pembangunan terpusat dan penyebaran yang cepat dari proses mekanisasi sektor pertanian yang menyebabkan generasi muda enggan menggeluti dunia pertanian.

Kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas perekonomian akan terpusat pada suatu area yang memiliki tingkat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi. Hubungan positif antara konsentrasi penduduk dengan aktivitas kegiatan ekonomi ini akan menyebabkan makin membesarnya area konsentrasi penduduk atau kepadatan penduduk yang tinggi. Dampak yang timbul adalah terjadinya *sprawling area* yang menciptakan wilayah tidak saling terikat secara fungsi antara satu dengan lainnya. Beberapa dampak urbanisasi antara lain:

1) Pemukiman kumuh.

Seiring dengan meluasnya urbanisasi, tumbuh subur kantong-kantong pemukiman kumuh (*slum area*) dan kampung-kampung di tengah kota yang serba menyesakkan dan liar. Namun pemukiman-pemukiman ini terus mendapat tambahan dari para pendatang baru. Pemukiman-pemukiman kumuh di kota dapat dilihat

di daerah pinggiran sungai, di bawah jembatan, daerah pinggiran rel, pusat perdagangan, dan sebagainya.

2) Permasalahan lingkungan.

Pengalihan fungsi lahan secara berlebihan menimbulkan ketidak seimbangan alam akibat pembangunan yang dilakukan tanpa perencanaan terpadu. Pengelolaan sarana dan prasarana kota yang tidak baik juga turut menyumbang terhadap semakin tingginya angka kerusakan alam.

3) Pengangguran dan kemiskinan.

Bertambahnya jumlah pencari tenaga kerja sektor formal dan informal karena tingkat penawaran tenaga kerja jauh melebihi tingkat permintaan yang ada, sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan semi pengangguran di daerah perkotaan. Terbatasnya pendidikan, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki menjadi penghalang bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran akhirnya menyumbang pada semakin besarnya komposisi orang-orang atau masyarakat miskin di perkotaan.

c. Gambaran umum Padukuhan Mrican

Padukuhan Mrican merupakan salah satu dari 20 Padukuhan di Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Padukuhan Mrican dengan luas wilayah 545.293 m². Letak Padukuhan Mrican Secara geografis terhadap pusat kota dan pemerintahan relatif dekat dan mudah terjangkau.

Jarak dengan Kalurahan Caturtunggal 0,5 km, jarak dengan Kapanewon Depok 1,5 km dan jarak dengan Kabupaten Sleman 10 km. Peta lokasi padukuhan Mrican Kalurahan Caturtunggal dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1. Peta Padukuhan Mrican Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok

Wilayah Padukuhan Mrican dilewati Sungai Pelang dan menjadi batas dengan wilayah kalurahan Condongcatur. Berdasarkan karakteristik Sumber Daya Alam, padukuhan Mrican berada di tiga kawasan yaitu:

- 1) Kawasan Bantaran Sungai yaitu kawasan di sepanjang bantaran Sungai Pelang yang sebagian besar dimanfaatkan warga untuk permukiman (rumah tinggal dan pemondokan / kos-kosan) dengan kepadatan tinggi.
- 2) Kawasan Perekonomian, perdagangan dan jasa yaitu berada di sepanjang Jalan Affandi. Di lokasi hampir semua dimanfaatkan untuk usaha pertokoan, perkantoran maupun

perhotelan diantaranya Hotel Manohara dan Hotel Yellow Star.

- 3) Kawasan Pendidikan yaitu kawasan berdirinya Perguruan Tinggi maupun sekolah. Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Padukuhan Mrican yaitu Universitas Atmajaya, Universitas Sanata Dharma dan Universitas Negeri Yogyakarta. Sedangkan sekolah yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok dan Sekolah Menengah Atas Gama. Sehingga di sekitar lokasi Pendidikan tersebut banyak dimanfaatkan untuk pemondokan/ kos-kosan, warung makan maupun usaha jasa seperti laundry dan fotocopy.

Penduduk Padukuhan Mrican berada di wilayah Kalurahan Caturtunggal dengan jumlah penduduk sebanyak 45.821 jiwa. penduduk laki-laki sebanyak 22.683 jiwa dan perempuan 23.138 jiwa.

Berkembangnya wilayah padukuhan Mrican memberikan dampak positif bagi warga yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat dengan terbukanya peluang usaha untuk pemondokan, warung makan maupun jasa lainnya. Tetapi hal tersebut juga memberikan dampak negatif diantaranya wilayah padukuhan Mrican semakin padat, permukiman kurang tertata dan penuh dengan bangunan serta menempati bantaran sungai yang membahayakan bagi penghuni, tidak terkelolanya lingkungan dengan baik, dan kurangnya ruang terbuka hijau akibat kepadatan permukiman tersebut.

Kebutuhan akan permukiman yang tinggi untuk tinggal di Padukuhan Mrican berpengaruh terhadap ketersediaan lahan hijau (Ruang Terbuka Hijau) serta di beberapa RW menyebabkan permukiman tidak tertata dan kumuh terutama di bantaran sungai. Kawasan Bantaran sungai sudah dilakukan penataan oleh pemerintah kabupaten Sleman dengan program M3K (*Mundhur Mungah Madhep Kali*), dengan program ini semua rumah yang berada di bantaran sungai secara bertahap dilakukan relokasi sehingga tersedia jalan inspeksi disepanjang sungai.

Masyarakat padukuhan Mrican sangat heterogen mulai dari beragamnya suku, agama, tingkat sosial maupun mata pencaharian penduduk. Hampir semua mata pencaharian penduduk ditemukan di wilayah Padukuhan Mrican, sehingga secara ekonomi penghasilan masyarakat juga sangat beragam.

BAB II

URBAN FARMING



Fenomena *urban farming* atau pertanian perkotaan kian hari kian diminati oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Awalnya, konsep berkebun di lahan terbatas ini hanyalah sebatas inisiasi dari segelintir komunitas pecinta lingkungan yang bergerak secara mandiri. Kemudian, *urban farming* pun berkembang secara masif menjelma menjadi tren gaya hidup masyarakat urban. *Urban farming* yang dianggap beriringan dengan keinginan masyarakat kota untuk menjalani gaya hidup sehat. Hasil panen dari *urban farming* lebih menyehatkan lantaran sepenuhnya menerapkan sistem penanaman organik, yang tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia.

a. Definisi *Urban Farming*

Mougeot (2000) mendefinisikan *urban farming* sebagai suatu industri yang terletak di dalam kota (*intra-urban*) atau di pinggiran kota (*peri-urban*) dari suatu kota kecil atau kota besar, yang tumbuh dan berkembang, distribusi dan proses

keanekaragaman makanan dan produk bukan makanan (*non food produc*) yang sebagian besar menggunakan sumberdaya alam dan manusia (lahan, air, genetika, energi matahari dan udara), jasa dan produk-produk yang tersedia di dalam dan di sekitar wilayah kota, dan pada gilirannya sebagai penyedia sumberdaya material dan manusia, sebagian jasa dan produk untuk wilayah perkotaan itu sendiri.

Food and Agriculture Organization (FAO), 2008 menjelaskan bahwa *Urban farming* adalah sebuah industri yang memproduksi, memproses, dan memasarkan produk dan bahan bakar nabati, terutama dalam menanggapi permintaan harian konsumen di dalam perkotaan, yang menerapkan metode produksi intensif, memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya dan limbah perkotaan untuk menghasilkan beragam tanaman dan hewan ternak. Sedangkan menurut Rambe (2014), *urban farming* adalah praktek budidaya, pemrosesan dan distribusi bahan pangan di sekitar kota. Urban farming juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wanatani, dan hortikultura.

Secara umum *urban farming* adalah bentuk usaha, komersial ataupun bukan, yang berkaitan dengan produksi, distribusi, serta konsumsi dari bahan pangan atau hasil pertanian lain yang dilakukan di lingkungan perkotaan (Belinda, 2017). Kegiatan ini meliputi penanaman, panen, dan pemasaran berbagai bahan pangan serta berbagai bentuk peternakan yang memanfaatkan lahan yang tersedia di perkotaan, umumnya *urban farming* dilakukan di lokasi-lokasi yang terlantar.

b. Manfaat *Urban Farming*

Pelaksanaan *urban farming* dilakukan melalui pemanfaatan lahan tidur dan lahan kritis, pemanfaatan ruang terbuka hijau (privat dan publik), pengoptimalan kebun sekitar rumah, dan penggunaan ruang. Menurut Rambe (2014), *urban farming* memberikan kontribusi penyelamatan lingkungan dengan pengelolaan sampah berbasis *reuse* dan *recycle*. Manfaat pelaksanaan *urban farming* adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu menciptakan kota yang bersih dengan pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) untuk pengelolaan sampah kota,
- 2) Dapat menghasilkan udara segar dan meningkatkan kualitas lingkungan kota,
- 3) Meningkatkan estetika dan keindahan kota,
- 4) Mengurangi biaya dari pengelolaan sampah,
- 5) Pemenuhan bahan pangan keluarga yang lebih segar,
- 6) Memberikan penghasilan tambahan bagi penduduk kota.

Organisasi pangan dan pertanian dunia, *Food and Agriculture Organization (FAO)* juga menganjurkan negara-negara berkembang seperti Indonesia, untuk menerapkan *urban farming*, mengingat beberapa keuntungan yang didapat dari pelaksanaan dari *urban farming*, yaitu:

- 1) Membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
- 2) Di wilayah padat penduduk, *urban farming* menjadi strategi yang tepat dalam upaya membantu rumah tangga ekonomi

lemah dalam memperbaiki keamanan pangan dan asupan nutrisi anggota keluarga.

- 3) Membuat lingkungan lebih sehat.
- 4) Melalui langkah penghijauan, lingkungan dapat menjadi lebih sehat sekaligus mengurangi polusi udara. Makin banyak orang yang menerapkan *urban farming*, maka kualitas lingkungan dapat meningkat.
- 5) Mengurangi stres.
- 6) *Urban farming* juga diyakini dapat mendukung proses relaksasi, serta memberikan ruang ketenangan di tengah padatnya populasi manusia.
- 7) Mengurangi limbah domestik.
- 8) Air buangan yang masih layak bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Sementara itu, sampah organik dan anorganik dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai pupuk dan media *urban farming*. Dengan begini, kita dapat mengelola dan mengurangi sampah di sumbernya.

c. Metode *Urban Farming*

Menurut Sedana (2020), konsep *urban farming* dapat menjadi upaya pemerintah untuk menguatkan ketahanan pangan negara, meningkatkan perekonomian masyarakat, memperbaiki ekologi kota, dan mempertahankan nilai sosial dan budaya Indonesia. Model pertanian kota yang banyak dilakukan adalah hidroponik lalu disusul perikanan dan terakhir adalah *rooftop garden*.

Tanaman yang dapat diusahakan dalam pengelolaan usaha *urban farming* adalah jenis sayuran hijau, herbal, umbi-umbian, buah-buahan dan juga tanaman hias. Tanaman sayuran yang biasa diusahakan adalah selada pokcay, sawi, seledri, kucai, bayam, dan kangkung. Tanaman herbal yang dapat dibudidayakan adalah jahe, sereh, lengkuas dan jenis lainnya. Pengelolaan usaha tani tanaman-tanaman tersebut di atas adalah sangat mudah dengan menggunakan teknologi yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Penggunaan teknologi yang lebih banyak biasanya digunakan untuk budidaya tanaman hias dan tanaman yang ditujukan untuk memperoleh nilai komersial yang lebih tinggi. Saat ini sudah banyak diciptakan inovasi bercocok tanam/ pertanian lahan terbatas perkotaan (*urban farming*) antara lain :

- 1) Bercocok Tanam dengan tabulampot. Metode tanam dengan tabulampot merupakan metode tanam dengan lebih mengoptimalkan penggunaan pot. Biasanya metode ini lebih cenderung ke tanaman buah-buahan.
- 2) Bercocok Tanam dengan cara hidroponik. Metode tanam dengan hidrponik merupakan budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman.
- 3) Bercocok tanam dengan metode *aeroponic*. Metode aeroponic merupakan metode bercocok tanam dengan memberdayakan udara. Pada dasarnya metode ini merupakan salah satu tipe dari metode hidroponik karena

juga memanfaatkan air dan tanpa tanah sebagai media tanam.

- 4) Bercocok tanam dengan metode vertikultura. Metode vertikultura merupakan cara bertanam yang dilakukan dengan menempatkan media tanam dalam wadah-wadah yang disusun secara vertical. Metode ini sangat cocok untuk diterapkan dalam membudidayakan tanaman yang berumur singkat seperti sayuran.
- 5) Bercocok tanam dengan metode aquaponic. Metode Aquaponik merupakan metode budidaya pertanian yang mengkombinasikan antara budidaya tanaman dan budidaya perairan, seperti ikan dan memiliki sifat saling menguntungkan.
- 6) Bercocok tanam dengan metode *wall gardening*. Metode *wall gardening* merupakan konsep penanaman yang memiliki kesamaan dengan vertikultur, tetapi menggunakan dinding sebagai media tanamnya. Beberapa tanaman yang bisa dibudidayakan adalah cabai, tanaman hias, dan sejenisnya.

d. Kendala dan Tantangan *Urban Farming*

Masalah yang dihadapi masyarakat dalam melakukan *urban farming* kebanyakan adalah terserang hama penyakit tanaman, kekurangan modal untuk mengembangkan, adanya hambatan akibat cuaca ekstrim dan kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam usaha pertanian kota (Parsudi, 2019).

Tantangan pengembangan dalam pelaksanaan *urban farming*, antara lain:

- 1) Lahan dan akses lahan pertanian perkotaan dapat dilakukan petani urban hampir di seluruh lahan yang ditemukan dan lahan tersebut aman untuk dimanfaatkan. Lahan non pertanian yang dapat dimanfaatkan menjadi lahan pertanian adalah pekarangan rumah, halaman parkir, atap gedung, boulevard, dan lahan terbuka lainnya. Terdapat dua kunci tantangan untuk melindungi lahan yang dimanfaatkan untuk *urban farming*, yaitu adanya akses lahan yang dimanfaatkan dan kebijakan serta regulasi untuk mencegah penggunaan lahan non pertanian
- 2) Jenis lahan untuk *urban farming*. Lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian perkotaan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pekarangan/Halaman Pemukiman Pemanfaatan lahan pada pemukiman tergantung komitmen dari pengembang dan pemilik rumah masing-masing.
 - b) Lahan terbuka (tempat parkir dan atap). Lahan parkir dan atap gedung biasanya dimiliki oleh swasta dan pemerintah, lahan yang dikembangkan menjadi lahan pertanian perkotaan biasanya bersifat sementara dan pemanfaatannya pada saat lahan tersebut masih dalam masa pakai.
 - c) Taman dan ruang terbuka hijau. Lahan ini biasa dimiliki oleh pemerintah, swasta dan pengembang perumahan.

- d) Lahan institusi. Lahan terbuka yang terdapat di Lembaga-lembaga seperti rumah sakit, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya baik pemerintah dan swasta. Ruang terbuka yang ada di lembaga/institusi tersebut biasanya dikembangkan menjadi ruang vertical garden untuk memberikan kenyamanan dan estetika, namun dalam pengembangan tanaman pangan masih belum dikembangkan lebih lanjut.
- e) Lahan pertanian. Lahan pertanian atau sawah yang terdapat di perkotaan. Lahan ini semakin berkurang dengan adanya alih fungsi lahan. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang membutuhkan lahan terbangun untuk pemukiman, perdagangan dan kawasan terbangun lainnya.

Menurut Bereja (2010) dalam Hutabarat (2019), pengembangan gerakan *urban farming* dapat menjadi salah satu kekuatan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Gerakan *urban farming* dapat menjadi alternatif untuk menjaga ketahanan pangan khususnya dalam skala rumah tangga miskin. Gerakan pengembangan pertanian perkotaan sangat berdampak positif dalam pengentasan serta penurunan kemiskinan dan dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat. Secara fisik pertanian perkotaan perlu ditingkatkan karena memberikan kontribusi dan manfaat yang besar dalam penyediaan ruang terbuka hijau. *Urban farming* atau *urban agriculture* sebagai cara untuk membudidayakan tanaman dan/atau memelihara hewan ternak didalam dan di sekitar wilayah kota besar/metropolitan

atau kota kecil untuk memperoleh bahan pangan/kebutuhan lain dan tambahan finansial, termasuk di dalam pemrosesan hasil panen, pemasaran, dan distribusi produk hasil kegiatan tersebut.

e. Urban farming di Padukuhan Mrican

Urban farming di Padukuhan Mrican dimulai tahun 2013 yang diinisiasi oleh dukuh Mrican yang diawali dengan adanya sosialisasi ruang terbuka hijau dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Sosialisasi ini dilakukan karena ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayah padukuhan Mrican mulai tergantikan dengan bangunan untuk hunian atau usaha. Pada awal rintisan *urban farming* Dukuh Mrican dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah dukuh dan pagar gang masuk yang sangat sempit dan terbatas untuk menanam berbagai tanaman sayuran. Dukuh juga membagikan berbagai bibit tanaman sayuran ke anggota PKK untuk dibagikan ke warga di setiap Rukun Tangga maupun Rukun Warga. Warga mulai antusias dan tertarik untuk melakukan penanaman.

Urban farming yang sudah dilakukan warga masyarakat terkendala karena keterbatasan sumber daya alam terutama tanah dan pupuk serta teknis budidaya tanaman mulai pembibitan sampai panen, sehingga dukuh berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan serta pemerintah Kalurahan Caturtunggal untuk memberikan pendampingan ke masyarakat dan akhirnya tahun 2014 terbentuk Kelompok Wanita Tani Srikandi.

Pengurus Kelompok Wanita Tani Srikandi mulai mewajibkan seluruh anggota kelompok untuk melakukan penanaman sayuran dengan memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing dengan bantuan prasarana pupuk serta berbagai bibit tanaman dari dukuh Mrican yang dilakukan proses pesemaian secara berkelompok selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota, sehingga seluruh anggota harus mempunyai tanaman yang dipelihara di pekarangan masing-masing.

Dampak positif dari *urban farming* yang dilaksanakan oleh masyarakat padukuhan Mrican dan anggota Kelompok Wanita Tani Srikandi, kelompok mulai diikuti dalam berbagai event lomba atau pameran baik ditingkat Kapanewon Depok maupun Kabupaten Sleman, lokasi demplot menjadi rujukan dari Dinas untuk edukasi studi banding dari berbagai wilayah di Sleman maupun luar Sleman, lokasi KKN berbagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi di Yogyakarta, lokasi penelitian berbagai mahasiswa sarjana maupun pasca sarjana dan menjadi salah satu KWT percontohan di Kabupaten Sleman.

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Pemberdayaan merupakan suatu terminologi yang telah menjadi *mainstream* atau paradigma dalam mendorong kemajuan dan perubahan masyarakat. Pemberdayaan merupakan paradigma pembangunan manusia, yaitu suatu pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people center development*) dengan mendorong prakarsa masyarakat dan partisipasi dari bawah. Upaya yang dilakukan fokus pada akar persoalan, yaitu meningkatkan kemauan dan kemampuan rakyat. Masyarakat digali dan didorong kemauannya, kesadarannya dan ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya.

a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau “kemampuan”, yang dalam bahasa Inggris disebut “*Power*”. Pemberdayaan memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah (Yunus dan Fadli 2017). Mas’oed (1997) dalam Mardikanto

& Soebiato (2019), pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk dapat mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Mardikanto & Soebiato (2019) menyatakan bahwa sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidup.

Rayuddin (2018) menyatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama- sama dengan ikatan-ikatan tertentu dan mengorganisi diri secara tertib dalam kurun waktu yang relative cukup lama. Masyarakat menjalankan hubungan antara individu dengan individu lainnya. Hubungan itu biasanya menyangkut hubungan timbal balik antara individu

dengan individu, kelompok dengan kelompok atau individu dengan kelompok (sebagai interaksi sosial). Didalam masyarakat terjadi komunikasi, pergaulan antara individu dengan individu lainnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok tertentu, baik itu kelompok organisasi, kelompok jabatan atau profesi.

Chamber (1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*. Chamber (1995) menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Sumodiningrat (1999) dalam Mardikanto & Soebiato (2019) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling berkaitan, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memperdayakan.

Konseppembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga belum mengangkat sebagian

penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat. Berangkat dari kondisi itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah :

- 1) Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”
- 2) Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “ hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat”
- 3) Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

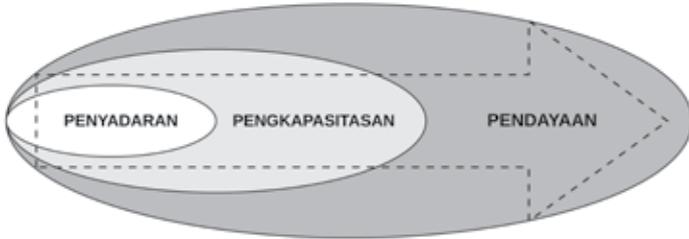
dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, social dan politik”

- 4) Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat Badan Pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :
 - a) Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat.
 - b) Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan , artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan.

b. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat (Soetomo, 2018). Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau *empowerment*.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan "proses instan". Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan), seperti pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Tahapan Pemberdayaan

Sumber : Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007

1) Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran dilakukan dengan memberikan pengetahuan *kognitif*, *belief*, dan *healing* kepada masyarakat agar menyadari bahwa mereka mempunyai sesuatu yang dapat membantu mereka keluar dari permasalahan yang dihadapi ataupun menjadi lebih baik dari kondisinya pada saat itu. Di samping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari permasalahannya. Pada tahap ini, masyarakat dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri (bukan dari orang lain).

2) Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan atau peningkatan kapasitas, sering disebut dengan istilah *capacity building* atau *enabling*. Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang

akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat miskin. Ada 4 jenis *capacity building*, yaitu manusia, usaha, kelembagaan dan lingkungan. Peningkatan kapasitas manusia dalam arti memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok, dapat dilakukan dengan pelatihan, lokakarya, seminar, sosialisasi, diseminasi informasi dan sejenisnya. Peningkatan Usaha dilakukan dengan pelatihan, workshop atau kegiatan lain yang memberikan ketrampilan usaha. Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan membantu masyarakat membuat “aturan main” atau kesepakatan diantara mereka sendiri. Peningkatan kapasitas lingkungan yang dapat dilakukan dengan pemahaman mengenai lingkungan fisik maupun sosial.

3) Tahap Pendayaan atau Pemberian Daya

Pada tahap ini masyarakat diberi daya, kekuasaan, otoritas atau kewenangan dalam mengidentifikasi masalah dan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Masyarakat juga diberi ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan. Pada tahap ini masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun

untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut.

c. Pemberdayaan Sebagai Proses

Mardikanto & Soebiato (2019), sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (kemampuan dan atau keunggulan bersing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individu, kelompok dan masyarakat dala arti luas).

- 1) Pemberdayaan sebagai Proses Perubahan. Pemberdayaan sebagai proses perubahan, memerlukan inovasi yang berupa ide-ide, produk, gagasan, metode, peralatan atau teknologi. Inovasi dikembangkan melalui kajian, pengetahuan atau pengembangan terhadap kebiasaan, nilai-nilai tradisi, kearifan lokal atau kearifan tradisional. Pemberdayaan sebagai proses perubahan mensyaratkan fasilitator yang kompeten dan memiliki integritas tinggi terhadap perubahan mutu-hidup masyarakat yang akan difasilitasi.
- 2) Pemberdayaan sebagai Proses Pembelajaran. Pemberdayaan harus didesain sebagai proses belajar atau dalam setiap upaya pemberdayaan, harus terkandung

upaya-upaya pembelajaran atau penyelenggaraan pelatihan. Pemberdayaan sebagai proses pembelajaran harus berbasis dan selalu mengacu kepada kebutuhan masyarakat, untuk mengoptimalkan potensi dan sumberdaya masyarakat serta diusahakan guna sebesar-besar kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan.

- 3) Pemberdayaan sebagai Proses Penguatan Kapasitas. Pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi tawar) agar masyarakat semakin mandiri. Penguatan kapasitas adalah proses penguatan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan.
- 4) Pemberdayaan sebagai Proses Perubahan Sosial. Pemberdayaan merupakan proses perubahan sosial yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya.
- 5) Pemberdayaan sebagai Proses Pembangunan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

- 6) Pemberdayaan sebagai Proses Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan memperbaiki mutu hidup mereka.

d. Prinsip -Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Mathews dalam menyatakan bahwa : “*Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten*”. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Leagans (1961) dalam Mardikanto dan Soebiato (2019), menilai bahwa setiap penyuluh/ fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Prinsip Kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program

yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat.

- 3) Keswadayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mut'adin (2002) dalam Shomedran (2016), kemandirian adalah suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama perkembangan, individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi lingkungan sehingga individu pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri dengan kemandiriannya seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk dapat berkembang dengan lebih mantap.

Kemandirian menurut Amien (2005) dalam Arianto & Fitriani (2013), menunjukkan kemampuan setiap entitas di dalam sebuah kelompok untuk memelihara dan meningkatkan kualitas dalam upaya menjaga keberlangsungan keberadaannya dan juga agar senantiasa berpartisipasi dalam proses pembaharuan. Dalam konsep kemandirian, kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal dengan mengacu pada karakteristik spesifik yang dimiliki. Selain sumber daya, proses-proses yang terjadi dalam konteks lokal harus mendapatkan perhatian khusus dan menjadi dasar pembangunan dan penguatan masyarakat.

Mulyadi (2015) menyatakan bahwa kemandirian di masyarakat tercipta jika masyarakat mampu memanfaatkan segenap potensi atau sumber daya yang ada disekitarnya. Mewujudkan kemandirian local melalui upaya pemberdayaan dapat dilihat melalui program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas diri dari masyarakat, meningkatkan tanggung jawab kolektif masyarakat dan meningkatkan kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan masyarakat.

Stienberg (1999) dalam Shomedran (2016), mengemukakan tiga aspek kemandirian yaitu kemandirian emosi (*emotional autonomy*), kemandirian perilaku (*behavioral autonomy*) dan kemandirian nilai (*values autonomy*). Kemandirian emosional merupakan kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Kemandirian perilaku merupakan kemampuan individu dalam menentukan pilihan atau keputusan untuk mengelola dirinya tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Kemandirian nilai, yakni kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, dan tentang apa yang penting dan tidak penting. Kemandirian ekonomi telah menjadi tuntutan yang harus segera diwujudkan. Ketergantungan pada pihak luar akan selalau menjadi penyebab seseorang atau keluarga tersebut tidak menjadi mandiri dalam perekonomian keluarganya. Menurut Avilliani (2012) dalam Shomedran (2016), kemandirian

ekonomi diartikan sebagai bangsa, masyarakat ataupun keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak tergantung pada pihak luar. Seseorang ataupun kelompok dikatakan akan memiliki jati diri dan karakter yang kuat apabila memiliki kemandirian ekonomi.

4) Berkelanjutan

Rindi (2019), program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

e. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019), tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

- 1) Perbaikan Pendidikan (*better education*). Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk Pendidikan yang lebih baik. Perbaikan Pendidikan melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat tetapi perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat berlaiae seumur hidup.

- 2) Perbaiki Aksesibilitas (*better accessibility*). Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitas, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan perakatan, Lembaga pemasaran.
- 3) Perbaiki Tindakan (*better action*). Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
- 4) Perbaiki kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 5) Perbaiki usaha (*better business*). Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnisilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 6) Perbaiki pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- 7) Perbaiki lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

- 8) Perbaiki kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 9) Perbaiki masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

f. Lingkup dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

1) Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Sumadya (2001) dalam Mardikanto & Soebiato (2019), merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang disebutnya sebagai Tri Bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan. Mardikanto (2003) dalam Mardikanto & Soebiato (2019) menambahkan pentingnya bina kelembagaan, karena ketiga bina yang dikemukakan hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

a) Bina Manusia.

Bina manusia merupakan semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/ pengembangan kapasitas yaitu pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas entitas/ kelembagaan dan pengembangan kapasitas sistem (jejaring).

b) Bina Usaha.

Bina usaha mencakup pemilihan komoditas dan jenis usaha, perencanaan bisnis, pembentukan badan usaha, pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan karier, manajemen produksi, logistik, finansial, penelitian dan pengembangan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis, pengembangan jejaring dan kemitraan serta pengembangan sarana prasarana pendukung.

c) Bina Kelembagaan.

Kelembagaan sering dikaitkan dengan pengertian “*social institution*” atau pranata sosial dan “*social organization*” atau organisasi sosial.

d) Bina Lingkungan.

Pengertian lingkungan tidak sekedar lingkungan fisik utamanya yang menyangkut pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, tetapi lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Tanggungjawaban sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang harus dilakukan terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat.

2) Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Tim Delivery (2004) dalam Mardikanto & Soebiato (2019), tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian

masyarakat. Secara rinci tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

a) Tahap 1. Seleksi lokasi.

Seleksi lokasi/ wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat.

b) Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan.

c) Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, dalam proses tersebut, masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya.
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok
- 3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok
- 4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif.

d) Tahap 4. Pemandirian masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

g. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Kartasasmita (1997) dalam Mardikanto & Soebiato (2019), menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan sendiri. Berdasarkan konsep tersebut, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut :

- 1) Upaya itu harus terarah (*targetted*), atau disebut juga pemihakan yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
- 2) Program itu harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
- 3) Menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Pendekatan kelompok adalah paling efektif dan lebih efisien dari SDM nya. Kemaitraan

usaha antar kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus menerus dibina dan dipelihara secara menguntungkan dan memajukan.

h. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Noor (2011), pemberdayaan masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait, misalnya :

- 1) Peranan Pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah.
- 2) Organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun local,
- 3) Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri (*local community organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya,
- 4) Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.

i. Penerima Manfaat dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto (1996) dalam Mardikanto & Soebiato (2019), telah mengganti istilah “*sasaran penyuluhan*” menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*). Pengertian penerima manfaat terkandung makna bahwa :

- a) Masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, fasilitator dan pemangku kepentingan pembangunan;
- b) Penerima manfaat bukanlah objek atau “sasaran tembak” yang layak dipandang rendah, tetapi ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan sekerja dalam mensukseskan pembangunan;
- c) Penerima manfaat mempunyai posisi tawar yang harus dihargai untuk menerima atau menolak inovasi yang disampaikan fasilitatornya;
- d) Penerima manfaat tidak berada dalam posisi dibawah penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan dalam kedudukan setara dan bahkan sering justru lebih tinggi kedudukannya dalam arti memiliki kebebasan untuk mengikuti atau menolak inovasi yang disampaikan penyuluhnya;
- e) Proses belajar yang belangsung antara penyuluh dan penerima manfaat bukanlah bersifat vertical (penyuluh menggurai penerima manfaatnya), melainkan proses belajar bersama yang partisipatif.

Mardikanto & Soebiato (2019) menyatakan bahwa penerima manfaat pemberdayaan masyarakat dapat dibedakan dalam :

- a) Pelaku utama, yang terdiri dari warga masyarakat dan keluarganya, yang selain sebagai penerima manfaat juga pengelola kegiatan yang berperan dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya (factor produksi).
- b) Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana dan pengendali kebijakan pembangunan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah elit masyarakat sejak di arus terbawah (desa) yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan.
- c) Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung/ memperlancar kegiatan pembangunan. Termasuk dalam kelompok ini adalah peneliti/ akademisi, produser, pelaku bisnis, pers/ media masa/ pusat informasi, aktivis/LSM/ tokoh masyarakat dan budayawan.

Istilah “*fasilitator*” adalah pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat. Lipit (1985) dan Rogers (1983) dalam Mardikanto & Soebiato (2019) menyebutnya sebagai “agen perubahan” (*change agent*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Berdasarkan status dan lembaga tempat

kerjanya (UU No. 16 Tahun 2006 tentang Desa), fasilitator dibedakan dalam :

- a) Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh/ fasilitator pemberdayaan masyarakat;
- b) Penyuluh/ Fasilitator Swasta, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta maupun penyuluh dari LSM;
- c) Penyuluh/ Fasilitator, yaitu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat yang secara sukarela melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilingkungannya. Peran penyuluh/ fasilitator untuk menyampaikan inovasi dan atau mempengaruhi penerima manfaat pemberdayaan melalui metode dan Teknik-teknik tertentu sampai penerima manfaat itu dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri mengadopsi inovasi yang disampaikan.

j. Indikator Keberdayaan Masyarakat

Mardikanto (2003) dalam Mardikanto & Soebiato (2019), mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup:

- a) Jumlah warga secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan

- b) Tingkat kemudahan penyelenggara program untuk memperoleh pertimbangan warga atas ide baru yang dikemukakan.
- c) Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukkan untuk kelancaran pelaksanaan
- d) Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat
- e) Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan
- f) Meningkatnya kemandirian masyarakat

Berdasarkan indikator keberdayaan, maka diperlukan adanya pengukuran keberdayaan untuk melihat apakah kegiatan tersebut berjalan dengan tepat, sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan segenap upaya dapat dilakukan dan dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran yang ingin dicapai.

BAB IV

PEMANGKU KEPENTINGAN



Pemangku kepentingan atau *stakeholder* menjadi keniscayaan dalam pemberdayaan masyarakat. Kondisi pemangku kepentingan mempunyai pengaruh yang besar dalam keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat. Pemangku kepentingan merupakan beberapa kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan program atau kegiatan pemberdayaan. Keberhasilan tujuan program atau kegiatan pemberdayaan adalah tercapainya tujuan dari sudut pandang pemangku kepentingan terkait yang secara tradisional diukur dari indikator ketepatan biaya, waktu dan kualitas sesuai kesepakatan pihak terkait. Ada suatu kecenderungan yang alamiah dari kelompok pemangku kepentingan untuk mencoba mempengaruhi kondisinya dalam keberhasilan program atau kegiatan pemberdayaan. Pengaruh kondisi atau keadaan pemangku kepentingan dalam mencapai keberhasilan tujuan program atau kegiatan pemberdayaan dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh pemangku kepentingan (Nguyen et al.,

2009), pengikatan (*engagement*) yang ada pada pemangku kepentingan (Ayuso et al., 2006) dan keberdayaan psikologis.

a. Definisi Stakeholder

Freeman (1984) mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

Identifying the stakeholders e a number of useful frameworks exist, some that take a very particular angle (for example a market orientation), and some that assume a purely transactional (input-output) view is sufficient (Freeman, 1984; Porter, 1980) (Ackermann & Eden, 2011)

Menurut Budiman (2008) dalam Sulastri (2017), *stakeholder* adalah orang-orang, atau kelompok-kelompok, atau lembaga-lembaga yang kemungkinan besar terkena pengaruh dari suatu kegiatan program atau proyek baik pengaruh positif maupun negatif, atau sebaliknya yang mungkin memberikan pengaruh. *Stakeholder* merupakan individu, sekelompok manusia, atau masyarakat yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap suatu organisasi.

Menurut Nugroho (2015) dalam Handayani & Warsono (2017), *stakeholder* dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

stakeholder adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan/atau mempengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan tersebut.

b. Klasifikasi Pemangku Kepentingan

Menurut Maryono, dkk (2005) dalam Handayani & Warsono (2017), pemangku kepentingan atau *stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok antara lain:

- 1) *Stakeholders* primer. *Stakeholder* primer merupakan stakeholder yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Stakeholders yang memiliki pengaruh dan kepentingan dikatakan sebagai stakeholder primer dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.
- 2) *Stakeholders* kunci. *Stakeholder* kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Di dalam penelitian ini stakeholders kunci adalah stakeholders yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Rembang.
- 3) *Stakeholders* sekunder atau pendukung. *Stakeholders* pendukung merupakan stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. Stakeholders pendukung menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan

dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. *stakeholders* pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, dan peneliti.

c. Peran *Stakeholders*

Peran *Stakeholders* menurut Nugroho (2014) dalam Handayani & Warsono (2017), antara lain:

- 1) *Policy creator* yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- 2) Koordinator yaitu *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.
- 3) Fasilitator yaitu *stakeholder* sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- 4) Implementer yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- 5) Akselerator yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

d. Pemetaan *Stakeholder* (*stakeholder mapping*)

Menurut WHO (2007) dalam Riskiyah (2018), pemetaan *stakeholder* adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak

kunci, kelompok, atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan. Hasil dari pemetaan stakeholder setidaknya dapat memberikan informasi penting berikut ini:

- 1) Siapa saja yang akan dipengaruhi;
- 2) Siapa saja yang dapat mempengaruhi baik dalam proses maupun hasil dari sebuah kegiatan;
- 3) Pihak mana saja yang harus dilibatkan, dan
- 4) Kapasitas siapa yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan mereka terlibat dalam sebuah kegiatan.

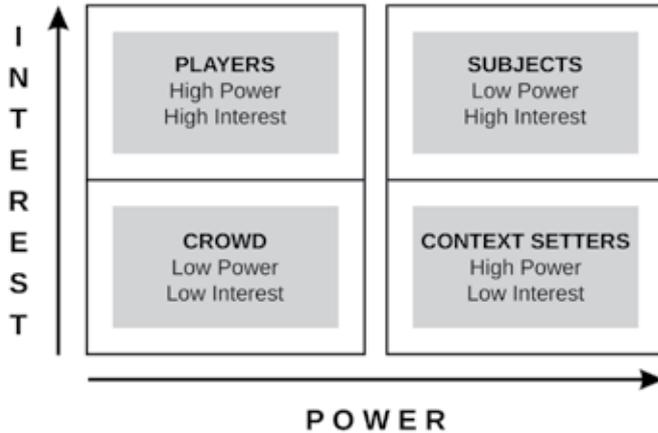
e. Metode Analisis Stakeholder

Menurut Suporahardjo (2005) dalam Riskiyah (2018), analisis *stakeholder* merupakan suatu pendekatan dan prosedur untuk mencapai pemahaman suatu sistem dengan mengidentifikasi aktor-aktor kunci atau stakeholder kunci di dalam sistem dan menilai kepentingan masing-masing di dalam sistem tersebut. Analisis stakeholder bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami sifat kerjasama yang ada antara stakeholder yang berbeda-beda, serta menunjukkan dengan tepat peluang untuk mengembangkan kerjasama di masa mendatang.

Menurut Ackermann dan Eden (2011) dalam Riskiyah (2018), metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan dengan mengklasifikasikan stakeholder ke dalam *key player*, *context setter*, *subject* dan *crowd*, yaitu:

- 1) *Key player* (influence dan interest tinggi) merupakan stakeholder yang paling aktif dalam pengelolaan karena mereka mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek.
- 2) *Subject* (memiliki interest tetapi dengan influence yang kecil) memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Stakeholder jenis ini bersifat supportive, mempunyai kapasitas yang kecil untuk mengubah situasi. Namun mereka dapat mempengaruhi yang lain jika membentuk aliansi dengan stakeholder lainnya dan juga sebaliknya mungkin dapat dipengaruhi oleh stakeholder lainnya.
- 3) *Context setter* (memiliki influence akan tetapi hanya memiliki direct interest yang kecil) memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi risiko yang signifikan untuk harus dipantau.
- 4) *Crowd* (lemah dalam influence serta interest) merupakan stakeholder yang memiliki sedikit pengaruh dan kepentingan terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Pengaruh dan kepentingan akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan.

Matriks kepentingan – pengaruh Stakeholder dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1. Matriks Kepentingan-Pengaruh (*interest-influence matrix*)

(Sumber: Achermann and Eden (2011))

BAB V

PEMBERDAYAAN MELALUI URBAN FARMING PADA KELOMPOK WANITA TANI SRIKANDI



a. Profil Kelompok Wanita Tani Srikandi

Proses terbentuknya KWT Srikandi diawali komunikasi dengan pihak desa Caturtunggal tahun 2013 agar mendapatkan pelatihan dari Desa. Selanjutnya tahun 2013, dukuh mengumpulkan ibu-ibu PKK dan diberikan pembinaan dari PPL. Akhir Tahun 2013 membentuk KWT Srikandi dengan anggota 23 orang. Selanjutnya Kelompok Wanita Tani Srikandi dikukuhkan oleh Kepala Desa Caturtunggal pada tanggal 24 Desember 2014 sebagai Kelompok Tani Pemula sesuai Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Pemula nomor 13/Ds. CT/kesej/XII/ 2014 dengan jumlah anggota awal sebanyak 32 orang anggota dengan komoditas unggulan sayuran. Awal mula terbentuknya kelompok sekretariat kelembagaan berada di rumah dukuh Mrican Jl. STM Pembangunan 17 C padukuhan Mrican. Kelompok Wanita Tani Srikandi merupakan kelompok tani yang fokus pada *urban farming* di Padukuhan Mrican, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok.

Visi dan Misi Kelompok Wanita Tani Srikandi

- 1) Visi : Maju Tanpa Menunggu
- 2) Misi : membuat warga bertanam sayur dan buah di pekarangan rumah untuk ketahanan pangan keluarga dan penyediaan ruang terbuka hijau di Padukuhan Mrican dan mengajak warga bahwa hanya dengan lahan terbatas tetap bisa bertanam.

Kepengurusan Kelompok Wanita Tani Srikandi pertama kali disahkan oleh Kepala Desa Caturtunggal berdasarkan Surat Keputusan nomor 13/Ds.CT/Pemb/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 masa bakti 2014-2020. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 51/ Keb.Kel/CT/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 telah disahkan pengurus Kelompok Wanita Tani Srikandi Padukuhan Mrican masa bakti tahun 2021-2026. Struktur organisasi Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat dilihat pada gambar 5.1.



Gambar 5.1. Bagan Struktur Organisasi Kelompok Wanita Tani Srikandi

Jumlah anggota KWT Srikandi Mrican adalah sejumlah 40 orang yang terdiri dari warga padukuhan Mrican Caturtunggal Depok Sleman. Kelompok Wanita Tani Srikandi dikukuhkan oleh Lurah Caturtunggal pada tanggal 24 Desember 2014 sebagai kelompok tani kelas pemula sesuai Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Pemula nomor 13/ Ds. CT/kesej/XII/ 2014 dengan nomor register 34.04.070.001.551.1474. Selanjutnya berdasarkan Sertifikat Pengukuhan Kelas Kemampuan Kelompok Tani nomor

002/814 oleh Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Kelompok Wanita Tani Srikandi dikukuhkan sebagai kelompok tani kelas lanjut pada tanggal 05 Maret 2021 dengan nomor register 34.04.070.001.551.2272.

b. *Urban Farming* oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi

Sejak terbentuknya Kelompok Wanita Tani Srikandi serta *urban farming* yang sudah dilaksanakan diseluruh anggota, pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah kalurahan dan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman mulai diterima oleh kelompok. Kelompok Wanita Tani Srikandi diikutkan dalam studi banding Kawasan Rumah Pangan Lestari pada tahun 2013 oleh Pemerintah Kalurahan Caturtunggal ke Salatiga Jawa Tengah. Fasilitasi sarana prasarana serta berbagai pelatihan *urban farming* dan olahan makanan yang didanai melalui Pagu Usulan Partisipatif Masyarakat hasil Musrenbang RKPD maupun regular dari Dinas Pertanian Pangan dan perikanan dilaksanakan di Kelompok Wanita Tani Srikandi, berbagai pelatihan mulai dilaksanakan di kelompok sampai saat ini.

Dukuh Mrican dan Kelompok Wanita Tani Srikandi selanjutnya berinisiasi menyelenggarakan lomba pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW setiap 2 tahun sekali dengan tujuan agar *urban farming* tidak hanya dilakukan anggota dan pengurus kelompok tetapi menjadi kegiatan semua warga masyarakat dan *urban farming* berkelanjutan dengan keterlibatan seluruh

masyarakat. Lomba pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW dilaksanakan tahun 2016, 2018 dan 2020. Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan, setiap RW berkompetisi menampilkan potensi dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam berbagai tanaman dengan berbagai permasalahan yang beragam.

Komitmen Kelompok Wanita Tani Srikandi untuk melakukan *urban farming* dengan berbagai keterbatasan dan permasalahan mendapatkan apresiasi dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, dengan mengajukan Kelompok Wanita Tani Srikandi untuk mendapatkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Tahun 2019, KWT Srikandi mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pembuatan kebun bibit, kebun demplot, kandang ternak, penanaman di demplot serta kewajiban semua anggota untuk menanam dipekarangan rumah dengan 70 polibag tanaman sayuran.

Program ini akan berjalan selama 5 tahun, dengan pendampingan penuh 3 tahun pertama. Tahun 2020, kelompok mendapatkan apresiasi atas keberhasilan program KRPL dengan tambahan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 untuk Program Pengembangan Pangan Lestari (P2L) dari Kementerian Pertanian. Pelaporan dari masing-masing anggota KWT terkait jenis tanaman yang diusahakan maupun perkembangan jenis tanaman di Demplot serta kegiatan anggota kelompok selama

program KRPL berlangsung dilaporkan secara rutin ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

Kelompok Wanita Tani Srikandi selain mengelola demplot KRPL mempunyai tugas memberikan sosialisasi maupun pelatihan secara berjenjang kepada masyarakat Padukuhan Mrican yang belum menjadi anggota untuk melakukan *urban farming* dengan memanfaatkan pekarangan yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan masyarakat masing-masing.

Kelompok Wanita Tani Srikandi sejak dirintis fokus pada *urban farming* dengan komoditas unggulan sayuran. Kegiatan Kelompok Wanita Tani Srikandi antara lain pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman sayuran, pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman obat, Budidaya ikan lele dalam ember (Budidamper), Budidaya ikan Nila, Bertenak ayam jawa super (JAPER), pengembangan dan budidaya tabulapot, pemanfaatan hasil penanaman lahan pekarangan menjadi olahan pangan, pemanfaatan hasil penanaman lahan pekarangan untuk peningkatan gizi balita dan lansia, pembagian bibit dan media tanam, praktek pembuatan menu pangan berpola B2SA dengan bahan lokal, sosialisasi pola pangan B2SA, demo budidaya tanaman sayuran lahan terbatas di sekolah dasar, hidroponik dan pemasaran produk pangan segar hasil pekarangan dan produk olahan pangan lokal hasil pekarangan.

Pada tahun 2019, Kelompok Wanita Tani Srikandi mendapatkan bantuan program Kawasan Rumah Pangan lestari (KRPL) dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan DIY dan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Tahun 2020 dilanjutkan dengan mendapatkan bantuan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Kegiatan Kelompok Wanita Tani Srikandi untuk mendukung program KRPL antara lain :

1) Pengembangan Kebun Bibit

Kebun bibit dibangun di lokasi tanah kas Desa Caturtunggal yang telah diserahkan dan dipercayakan pengelolaan tanahnya kepada KWT SRIKANDI. Pengembangan kebun bibit di butuhkan rumah bibit agar bibit tanaman sayuran yang di semai mampu hidup beradaptasi dengan alam. Maka kebutuhan utama yang harus disediakan adalah rumah bibit. Ukuran rumah bibit yang di bangun kelompok seluas 4 x 5 m dengan bentuk rumah kampung berbahan galfalum. Lapisan atas di berikan plastik Ultra Violet (UV) agar sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah.

Di samping rumah bibit ada tempat bibit khusus untuk bibit-bibit yang telah di pindahkan ke dalam polybag yang ukurannya lebih besar. Sebagai pondasi menggunakan bahan batako agar tikus tidak mudah masuk dalam rumah bibit. Berbagai bibit sayuran telah di hasilkan dari Kebun bibit diantaranya bibit terong, bibit tomat, bibit Caisim, bibit cabe, bibit bawang merah maupun bibit lainnya. Kebun bibit untuk mensuplai bibit di demplot dan diperuntukkan untuk anggota maupun masyarakat. Rumah Bibit Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat diliha pada gambar 5.2.



Gambar 5.2. Rumah Bibit Kelompok Wanita Tani Srikandi

Proses pembuatan bibit di rumah bibit demplot KWT Srikandi dapat dilihat pada gambar 5.3.



Gambar 5.3. Proses pembuatan bibit di Rumah Bibit

2) Pengembangan Demplot

Demonstrasi Plot (Demplot) merupakan salah satu media untuk memberikan contoh kepada warga sekitar kelompok agar termotivasi untuk menanam tanaman sayuran, memelihara ikan dan berternak ayam untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Demplot dibangun di atas Tanah Kas Desa Caturtunggal seluas 540,26 m² yang terletak di Gang Kuwera No.9 Mrican, sesuai dengan Surat Keterangan Izin Pemanfaatan Tanah Kas Desa Nomor : 145/Ds.CT/ 05/X/2019. Lahan sebelum dimanfaatkan untuk Demplot dapat dilihat pada gambar 5.4.



Gambar 5.4. Lahan sebelum dimanfaatkan untuk Demplot

Kegiatan pertanian dalam demplot KWT meliputi budidaya tanaman sayuran, budidaya tanaman buah dalam pot, budidaya lele dalam ember (Budikdamber), budidaya ikan nila serta bertenak ayam. Agar efektif dalam budidaya berbagai jenis pertanian tersebut maka dilakukan penjadwalan tugas dari 44 anggota untuk melakukan piket pemeliharaan setiap minggunya. Setiap pagi hari pasti ada anggota yang bertugas piket untuk melaksanakan pemeliharaan demplot sehingga tanaman, ternak dan ikan dapat tumbuh lebih baik. Pengembangan Demplot Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat dilihat pada gambar 5.5.



Gambar 5.5. Pengembangan Demplot KWT Srikandi

3) Pengembangan Pekarangan

Pengembangan pemanfaatan pekarangan untuk anggota KWT pada awalnya dilakukan dengan memberikan bibit tanaman sayuran dan buah kepada semua anggota kelompok wanita tani. Pembelian planter bag untuk mendukung penanaman tanaman buah dan polybag untuk tanaman sayuran. Pemberian media tanam berupa kompos, tanah dan sekam sehingga anggota bisa melakukan penanaman dengan polybag di lahan masing-masing.

Pengembangan pekarangan di lahan sempit perkotaan di upayakan dengan memanfaatkan ruang-ruang kosong dalam setiap rumah anggota. Beberapa teknik budidaya tanaman sayur yang di terapkan diantaranya dengan menggunakan vertikultur dengan pipa peralon, pemanfaatan tembok-tembok kosong dengan menggunakan wall planter, pemanfaatan limbah botol mineral dengan media tanah yang di tempel dinding, menggunakan polybag, menggunakan planter bag dan berbagai cara untuk memanfaatkan ruang.

Setiap anggota KWT Srikandi diwajibkan untuk menanam tanaman sebanyak 70 buah tanaman sayur di rumah masing-masing. Selain itu anggota juga wajib memelihara ayam yang di kandangkan di rumah. Pemanfaatan pekarangan untuk bertanam sayuran dapat dilihat pada gambar 5.6.



Gambar 5.6. Pemanfaatan pekarangan untuk bertanam sayuran

4) Pengembangan Pemanfaatan Pekaranga di luar Anggota Kelompok

Upaya pemasyarakatan dan pengenalan budidaya tanaman sayuran di pekarangan terus dilakukan oleh KWT Srikandi. Usaha yang dilakukan pada awalnya adalah dengan membagikan berbagai jenis tanaman sayuran dalam polybag kepada warga sekitar supaya mempunyai tanaman sayuran. Masyarakat di luar anggota kelompok diharapkan juga mempunyai kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan di setiap rumah tangga. Disamping itu di ruas-ruca jalan masuk di tanami berbagai aneka tanaman sayuran agar mampu di dimanfaatkan oleh masyarakat untuk peningkatan konsumsi sayuran.

Peningkatan motivasi masyarakat untuk menanam di pekarangan sudah di mulai sejak tahun 2016 dengan adanya

lomba pemanfaatan pekarangan lahan terbatas antar RW sejumlah 9 RW. Tujuan lomba adalah agar peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan semakin meningkat. Kriteria lomba yang di nilai adalah keanekaragaman budidaya di pekarangan, pemanfaatan hasil pekarangan, inovasi-inovasi lokal ramah lingkungan serta dinamika. Lomba Pemanfaatan Pekarangan terbatas antar RW dapat dilihat pada gambar 5.7.



Gambar 5.7. Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terbatas antar RW

b) Prestasi Kelompok Wanita Tani Srikandi

Kelompok Wanita Tani Srikandi berhasil meraih juara V tingkat nasional pada lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tahun 2020. KWT Srikandi merupakan salah satu perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju ketingkat nasional dan berhasil meraih peringkat lima nasional. Penilaian lomba dilakukan oleh juri dari Kementerian Pertanian RI, dan pada tanggal 23 September 2020 digelar panen

online panen P2L serentak secara nasional dan pemberian penghargaan P2L terbaik nasional tahun 2020. Kegiatan Panen P2L serentak Nasional di Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat dilihat pada gambar 5.8.



Gambar 5.8. Kegiatan Panen Peкарangan pangan Lestari serentak Nasional di KWT Srikandi

Pada tahun 2021, Kelompok Wanita Tani Srikandi mengikuti Lomba Adhi Karya Pangan Nusantara Tingkat Kabupaten Sleman yang diselenggarakan oleh Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman dan meraih Juara I. Penyerahan penghargaan APN Tahun 2021 Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat dilihat pada gambar 5.9.



Gambar 5.9 Penyerahan Penghargaan APN 2021 KWT Srikandi tahun 2021

c. *Urban Farming* di Padukuhan Mrican

Urban farming di Padukuhan Mrican diawali dengan adanya sosialisasi Ruang Terbuka Hijau dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan pembinaan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dan pemerintah kalurahan Caturtunggal. Dari hasil sosialisasi selanjutnya dirintis *urban farming* oleh Dukuh Mrican pada tahun 2013 dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang sempit dan terbatas untuk menanam berbagai tanaman sayuran dan membagikan berbagai bibit tanaman sayuran ke anggota PKK untuk dibagi ke warga di RT/ RW di Padukuhan Mrican agar ditanam dipekarangan masing-masing. Warga antusias dan tertarik untuk melakukan penanaman dipekarangan rumah. Selanjutnya kegiatan pemanfaatan pekarangan semakin lebih giat tahun 2014 setelah terbentuk Kelompok Wanita Tani Srikandi.

Urban farming menjadi kegiatan pilihan karena wilayah padukuhan Mrican sangat padat, penuh permukiman, banyak lokasi yang kurang dimanfaatkan dan digunakan untuk menumpukan sampah atau dibiarkan mangkrak, tetapi dengan adanya ide dukuh untuk memanfaatkan lahan sempit, warga antusias dan tertarik untuk melakukan penanaman di pekarangan rumah. *Urban farming* dapat memberikan pemahaman ke warga pentingnya Ruang Terbuka Hijau walaupun hanya dengan menanam sayuran di pekarangan. ini dilakukan karena wilayah padukuhan Mrican merupakan permukiman dengan kepadatan tinggi, sehingga tidak menyisakan Ruang Terbuka Hijau, ditemukan lokasi yang dibiarkan mangkrak dan dimanfaatkan untuk menumpuk sampah.

Awal mula *urban farming* ditentukan oleh dukuh sebagai pemangku wilayah dan penentu kebijakan, Kelompok Wanita Tani Srikandi sebagai pelaksana dan warga masyarakat sebagai penerima manfaat.

Urban farming yang dilakukan masyarakat Padukuhan Mrican antara lain budidaya vertikultur dengan memanfaatkan pagar, tembok dan dak rumah, budidaya hidroponik, pemanfaatan barang bekas untuk pengganti pot, tabulampot, penanaman di bantaran sungai, kebun RW, Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) diantaranya pembuatan rumah bibit dan kebun Demplot serta lomba pemanfaatan pekarangan antar RW. Jenis tanaman yang diusahakan adalah tanaman sayuran, tanaman buah dan tanaman hias.

Sebagian besar warga masyarakat memanfaatkan pekarangan terbatas dengan menanam berbagai tanaman sayuran, tanaman hias, tanaman buah dengan vertikultur dan memanfaatkan barang bekas (botol air mineral) yang diletakkan di pagar rumah warga atau pagar lingkungan. Menanam buah dalam pot, menanam dengan pot tanaman di atas dak rumah, memanfaatkan lahan yang tidak produktif di lokasi yang kurang strategis, menggantung tanaman di depan rumah dan penanaman di demplot KRPL yang dikelola oleh KWT Srikandi. Sistem hidroponik tidak banyak diusahakan oleh warga, tetapi ditemukan di demplot KRPL. *Urban farming* disesuaikan dengan potensi lahan yang ada. Beberapa RW yang mempunyai lahan kosong di wilayahnya atau lahan milik perorangan yang belum dimanfaatkan, dikelola dengan penanaman sayuran yang ditanam langsung di lahan. Pemanfaatan atap rumah untuk *urban farming* dapat dilihat pada gambar 5.10.



Gambar 5.10. Pemanfaatan atap rumah untuk lokasi *urban farming*

Pemanfaatan gang jalan untuk *urban farming* dapat dilihat pada gambar 5.11.



Gambar 5.11. Pemanfaatan gang jalan untuk *urban farming*

Urban farming menjadi kegiatan unggulan di Padukuhan Mrican antara lain karena komitmen Kelompok Wanita Tani melaksanakan *urban farming* dan antusias serta semangat warga masyarakat untuk melakukan penghijauan di pekarangan rumah, menumbuhkan rasa tanggungjawab pemangku wilayah di Padukuhan (RT dan RW), mengurangi pengeluaran di tingkat keluarga dan memperbaiki lingkungan agar tertata, bersih dan indah serta karena adanya dukungan dan motivasi dari pemerintah desa dan instansi terkait.

Tujuan *Urban farming* di Padukuhan Mrican yaitu memberikan pemahaman kepada warga pentingnya Ruang Terbuka Hijau dengan keterbatasan lahan, agar warga mempunyai kegiatan positif dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang sebelumnya mangkrak, menumbuhkan sikap gotong royong, saling kenal, mempererat hubungan antar

warga di masyarakat Mrican yang heterogen, memberikan kesempatan kepada warga untuk berinovasi dan berkreasi dalam hal pemanfaatan lahan di pekarangan dan lingkungan, memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai/ bekas untuk kegiatan penanaman, menambah ketrampilan terkait teknis *urban farming*, untuk ketahanan pangan, mengurangi pengeluaran warga dengan memetik sayuran di pekarangan rumah, untuk kesehatan warga dengan mengkonsumsi pangan yang sehat, penanggulangan stunting dan kesehatan ibu hamil dan meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Kegiatan *urban farming* yang akan dilaksanakan oleh masyarakat Padukuhan Mrican maupun Kelompok Wanita Tani Srikandi dilakukan melalui proses perencanaan kegiatan. Perencanaan melibatkan masyarakat dengan pendampingan dari pimpinan wilayah (Dukuh, RT dan RW), pengurus dan anggota KWT Srikandi. Perencanaan *urban farming* di KWT Srikandi terutama yang membutuhkan fasilitasi penganggaran dari pemerintah, akan diusulkan pada saat Musyawarah Padukuhan dan akan menjadi prioritas usulan di Musyawarah Perencanaan Kalurahan. Usulan kegiatan antara lain pelatihan pemanfaatan pekarangan, pelatihan olahan makanan dan pembinaan Kelompok. Kegiatan akan masuk di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Caturtunggal. Sedangkan kegiatan *urban farming* yang akan dilakukan oleh masyarakat diluar KWT Srikandi, antara lain lomba pemanfaatan pekarangan antar RW dan pengembangan kegiatan *urban farming*, kegiatan

direncanakan di musyawarah padukuhan kemudian akan disampaikan ke pertemuan RW dan RT sampai ke masyarakat.

Urban farming di Padukuhan Mrican dilaksanakan oleh anggota Kelompok Wanita Tani Srikandi yang terbentuk pada akhir tahun 2014. Sejak awal terbentuk, Kelompok Wanita Tani Srikandi menjadikan tanaman sayuran sebagai komoditas unggulan. Keterbatasan sumber daya alam di Padukuhan Mrican Kelompok Wanita Tani Srikandi menggerakkan kegiatan penghijauan di masyarakat agar lebih meluas dan mendapatkan fasilitasi pelatihan-pelatihan dari pemerintah.

Kegiatan *urban farming* selanjutnya dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif seluruh masyarakat Padukuhan Mrican disemua wilayah. Pelaksanaan *urban farming* di masyarakat disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya. *Urban farming* yang dilakukan di Padukuhan Mrican dipusatkan di masing-masing RW dan semua RW mendapatkan kegiatan tersebut. Hal yang membedakan adalah teknis penanaman yang disesuaikan dengan kondisi geografis RW setempat. RW yang berada di bantaran sungai Pelang karena kepadatan yang tinggi untuk permukiman sehingga kegiatan *urban farming* dilakukan dengan penanaman dalam pot, polybag atau bekas sampah anorganik dan vertikultur. Tanaman diletakkan di dak rumah, gang jalan maupun di pekarangan rumah. Sedangkan RW yang berada di wilayah perdagangan jasa serta area kampus dan masih ditemukan lahan kosong, maka warga memanfaatkan lahan untuk demplot atau kebun RW, serta memanfaatkan gang

jalan masuk serta pekarangan rumah warga. Pemanfaatan lahan di bantaran Sungai Pelang dapat dilihat pada gambar 5.12.



Gambar 5.12. Pemanfaatan lahan di bantaran Sungai Pelang

Pelaksanaan *urban farming* di padukuhan Mrican semakin intensif setelah ada kegiatan lomba pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW setiap 2 tahun sekali. Kegiatan dilakukan oleh masyarakat dengan melihat potensi wilayah masing-masing dilaksanakan sejak tahun 2016 dan berkelanjutan sampai sekarang.

Sedangkan di Kelompok Wanita Tani Srikandi, usulan kegiatan *urban farming* yang diusulkan melalui Musrenbang Kalurahan Caturtunggal akan dilaksanakan sesuai keputusan Lurah dalam RKP setiap tahunnya. *Urban farming* Kelompok Wanita Tani Srikandi dipusatkan di Demplot Kawasan Rumah Pangan lestari (KRPL) dan di rumah setiap anggota kelompok, karena dalam pelaksanaan program KRPL ada kewajiban setiap

anggota untuk menanam 70 polibag tanaman sayuran di pekarangan rumah masing-masing.

Walaupun *urban farming* menjadi kegiatan unggulan di Padukuhan Mrican, tetapi masih ditemukan warga yang belum bergerak melakukan kegiatan penanaman, keterbatasan lahan, waktu maupun keberadaan warga yang hanya membuka usaha di padukuhan Mrican.

Urban farming dimasyarakat sudah dilaksanakan hampir merata di wilayah padukuhan Mrican, baik warga yang tinggal di kawasan bantaran sungai, dipermukiman kawasan perekonomian maupun di kawasan pendidikan melakukan *urban farming* dengan memanfaatkan lahan yang ada dengan teknis penanaman disesuaikan dengan potensi lahan masing-masing, tetapi masih ada juga ditemukan warga yang belum melakukan penanaman karena sangat terbatasnya lahan yang dimiliki serta beragamnya masyarakat terutama masyarakat yang masuk dan keluar dari wilayah Padukuhan. Pelaksanaan *urban farming* sudah menjadi kebiasaan dan kewajiban warga masyarakat dan sudah menjadi kegiatan rutin yang melibatkan semua elemen baik anak-anak sampai orang tua.

Salah satu kegiatan rutin padukuhan adalah setiap 2 tahun sekali KWT Srikandi bersama dengan PKK padukuhan menyelenggarakan lomba pemanfaatan pekarangan terbatas tingkat RW, dimulai tahun 2016, 2018 dan 2020. Setiap RW menampilkan karakteristik *urban farming* yang disesuaikan dengan potensi dan ketersediaan lahan. Demplot KRPL Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat dilihat pada gambar 5.13.



Gambar 5.13. Demplot Kawasan Rumah Pangan Iestari KWT Srikandi

Penanaman tanaman sayuran di pekarangan rumah anggota Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat dilihat pada gambar 5.14.



Gambar 5.14. Penanaman tanaman sayuran di pekarangan anggota KWT Srikandi

Pelaksanaan *urban farming* di Padukuhan Mrican dengan pendampingan dari Kelompok Wanita Tani Srikandi sejak awal kegiatan di rintis dapat dipetakan sesuai dengan tabel 5.1 .

Tabel 5.1. Pemetaan pelaksanaan *urban farming* di Padukuhan Mirican

No	Kawasan	Pemanfaatan Lahan	Kegiatan <i>urban farming</i>	Kendala
1	Bantaran Sungai Pelang	Hunian, pemondoka, usaha, fasilitas umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pinggir sungai dimanfaatkan untuk <i>urban farming</i> - Permukiman warga sudah ada kegiatan <i>urban farming</i> - Fasilitas umum/ jalan/ gang / lahan kosong untuk <i>urban farming</i> 	<p>Penghuni pemondokan adalah mahasiswa atau pekerja yang tidak menetap.</p> <p>Keterbatasan lokasi untuk area parkir</p>

No	Kawasan	Pemanfaatan Lahan	Kegiatan urban farming		Kendala
2	Pendidikan	Hunian, pemondokan, usaha, fasilitas umum	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman warga sudah ada kegiatan <i>urban farming</i> - Fasilitas umum/ jalan/ gang / lahan kosong dimanfaatkan untuk <i>urban farming</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Hunian untuk kost sebagian besar belum ada <i>urban farming</i>. - Warga yang memiliki usaha belum semua melakukan <i>urban farming</i> 	Penghuni pemondokan adalah mahasiswa atau pekerja yang tidak menetap. Keterbatasan lokasi untuk area parkir
3	Perdagangan dan jasa (Jalan Affandi, Jl Mozes Gatot Kaca dll)	Usaha perdagangan dan jasa (Hotel)	Warga yang tinggal di lokasi sudah melakukan kegiatan <i>urban farming</i>	Sebagian besar usaha di lokasi belum ada kegiatan <i>urban farming</i>	Keterbatasan lokasi, sebagian besar lahan untuk parkir Pengusaha yang menyewa dan tidak menetap

Hasil *urban farming* antara lain berbagai sayuran, bibit tanaman sayuran, tanaman sayuran dan buah serta hasil olahan produk *urban farming* seperti aneka keripik. Hasil dimanfaatkan oleh keluarga, tetangga, anggota KWT dan warga masyarakat. Hasil sayuran segar dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga, dibagikan ke tetangga dan warga sekitar, dimanfaatkan untuk diolah menjadi makanan tambahan bagi balita di posyandu serta diolah menjadi berbagai olahan pertanian. Hasil *urban farming* ini belum banyak yang dijual untuk meningkatkan pendapatan warga, mengingat hasil yang terbatas karena diusahakan di lahan yang terbatas.

Selain itu hasil dari kegiatan *urban farming* adalah lingkungan menjadi hijau dan segar di kawasan perkotaan serta silaturahmi antara warga menjadi lebih intensif dan guyub serta sikap gotong royong yang semakin baik.

Berdasarkan hasil observasi, hasil kegiatan *urban farming* di Padukuhan Mrican terbatas, karena lokasi penanaman juga tidak luas. Hasil banyak dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga sendiri dan kelebihanannya diberikan ke tetangga untuk konsumsi sendiri. Hasil juga diolah menjadi produk olahan dan dijual dalam bentuk makanan jadi. Hasil tanaman hias sebagian besar warga memanfaatkan untuk menambah estetika juga dijual secara umum. Hasil produksi di Kawasan Rumah Pangan Lestari, selain untuk konsumsi anggota, juga dimanfaatkan untuk tambahan makanan sehat bagi Posyandu, selebihnya diolah menjadi produk olahan dan dijual, selain itu karena KWT Srikandi

menjadi tujuan edukasi bagi masyarakat, produk tanaman yang ditanam di pot atau beragam bibit juga dijual ke tamu.

Pelaksanaan *urban farming* di masyarakat dan Kelompok Wanita Tani Srikandi selalu dilakukan pengawasan dan evaluasi dari instansi terkait. Pengawasan *urban farming* dilakukan sejak kegiatan dirintis tahun 2013 sampai sekarang. Pengawasan *urban farming* di masyarakat dilakukan oleh Dukuh, ketua PKK padukuhan, pengurus KWT Srikandi, sedangkan pengawasan program di kelompok dilakukan oleh Pemerintah kalurahan Caturtunggal dan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Pengawasan bertujuan untuk melihat lebih dekat perkembangan *urban farming* di masyarakat, memberikan semangat kepada warga untuk melakukan kegiatan di pekarangan masing-masing. Warga merasa dihargai dan *uwongke dan* memberikan saran masukan ke warga apabila ada hal terkait kegiatan yang perlu diperbaiki.

Hasil pengawasan *urban farming* di masyarakat bahwa kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan potensi masing-masing warga. Kegiatan lomba pemanfaatan pekarangan antar RW setiap 2 tahun sekali secara rutin dilaksanakan dan melibatkan warga dan memanfaatkan potensi wilayah, tetapi masih ada sebagian warga yang belum melaksanakan terutama untuk wilayah yang sebagian besar dimanfaatkan untuk usaha yaitu di Jl. Affandi maupun di pekarangan rumah yang dimanfaatkan untuk kost/ pemonudukan.

Setelah dilakukan pengawasan, semangat warga untuk melakukan penanaman semakin bertambah dan kegiatan meluas tetapi belum semua, masih perlunya motivasi dan edukasi ke warga masyarakat untuk mengiatkan kegiatan ini karena keterbatasan area dan kemampuan warga dan perlu ditekankan kelestarian dan keberlanjutannya di masyarakat.

Evaluasi *urban farming* di masyarakat padukuhan Mrican dilakukan oleh pemangku wilayah, pengurus Kelompok Wanita Tani Srikandi sedangkan *urban farming* yang dilaksanakan oleh kelompok, evaluasi oleh instansi pemerintah (kalurahan, Kapanewon, Dinas Pertanian pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi DIY khusus program KRPL dan P2L dan Penyuluh Pertanian Lapangan. Evaluasi dilakukan sejak kegiatan dirintis sampai sekarang.

Evaluasi di masyarakat dilakukan saat ada pelaksanaan lomba pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW 2 tahun sekali yang dimulai sejak tahun 2016. Evaluasi program KRPL di kelompok difokuskan di demplot Kelompok Wanita Tani Srikandi dengan pelaporan pemeliharaan demplot, laporan penanaman di demplot dan pekarangan anggota serta hasil panen dan pemanfaatannya. Evaluasi bertujuan untuk menilai kegiatan *urban farming* yang dilakukan oleh warga, sehingga mengetahui kekurangan dan hal yang perlu diperbaiki/ ditingkatkan, pembinaan ke warga masyarakat dan anggota KWT serta memberikan semangat ke masyarakat untuk melaksanakan program.

Pelaksanaan *urban farming* di masyarakat Padukuhan Mrican oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Pelaksanaan *urban farming* di masyarakat oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi

Sub Kegiatan	Pelaku	Proses/ Tahapan	Hasil	Kendala
Perencanaan	Masyarakat, Tokoh masyarakat, KWT Srikandi	Musyawarah di tingkat RT, RW dan Padukuhun	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan <i>urban farming</i> di semua wilayah RW - Sosialisasi dan pelatihan warga masyarakat - Lomba pemanfaatan pekarangan antar RW setiap 2 tahun sekali 	<ul style="list-style-type: none"> - Heterogen dan banyaknya masyarakat di setiap wilayah. - Keterbatasan dana swadaya/ fasilitas dari pemerintah guna mendukung kegiatan.

Sub Kegiatan	Pelaku	Proses/ Tahapan	Hasil	Kendala
Pelaksanaan	Masyarakat dan Anggota KWT Srikandi	Sosialisasi, pelatihan, implementasi <i>urban farming</i> , lomba pemanfaatan pekarangan antar RW	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Urban farming</i> hampir di semua pekarangan rumah warga dan lahan kosong di masing-masing RW. - Lomba pemanfaatan pekarangan setiap 2 tahun sekali (2016, 2018 dan 2020) - Sosialisasi dan pelatihan masyarakat oleh KWT Srikandi 	<p><i>Urban farming</i> berbenturan dengan kepentingan lain masyarakat untuk memanfaatkan lahan guna permukiman maupun usaha.</p>

Sub Kegiatan	Pelaku	Proses/ Tahapan	Hasil	Kendala
Hasil <i>urban farming</i>	Masyarakat dan Anggota KWT Srikandi	Budidaya, pengolahan hasil, Aspek lingkungan, sosial dan ekonomi dari kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sayuran segar untuk konsumsi keluarga dan masyarakat - Lingkungan menjadi hijau dan bersih - Silaturahmi, gotong royong semakin erat - Prestasi wilayah untuk memotivasi warga masyarakat 	Hasil <i>urban farming</i> belum banyak dimanfaatkan masyarakat untuk peningkatan pendapatan/ dijual, mempengaruhi keberlanjutan kegiatan.

Sub Kegiatan	Pelaku	Proses/ Tahapan	Hasil	Kendala
Pengawasan dan Evaluasi	Tokoh masyarakat, KWT Srikandi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>urban farming</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Urban farming</i> dilaksanakan sebagian besar warga - Lokasi usaha/kost masih perlu sosialisasi - <i>Urban farming</i> menumbuhkan Kembali nilai-nilai masyarakat terutama gotong royong - Lomba pemanfaatan pekarangan antar RW menjadi motivasi warga secara swadaya melakukan <i>urban farming</i> 	<p>Jumlah penduduk yang banyak dan masyarakat yang beragam/ heterogen menyebabkan kegiatan belum bisa merata ke semua rumah warga.</p> <p>Penyadaran harus selalu dilakukan ke warga masyarakat secara terus menerus oleh KWT sebagai pelaksana kegiatan.</p>

d. Peran Stakeholder dalam urban farming oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi

Pelaksanaan *urban farming* di Kelompok Wanita Tani Srikandi senantiasa mendapatkan pendampingan dan fasilitasi dari *stakeholder*. *Stakeholder* yang terlibat dalam *urban farming* antara lain Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan pemerintah Kelurahan Caturtunggal yang mendampingi sejak kegiatan dirintis tahun 2013 serta Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman yang mendampingi sejak terbentuknya Kelompok Wanita Tani Srikandi tahun 2014.

Keterlibatan *stakeholder* dalam *urban farming* karena tugas pokok fungsi dari *stakeholder* tersebut untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada KWT. Pendampingan Penyuluh Pertanian Lapangan di Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat dilihat pada gambar 5.15.



Gambar 5.15. Pendampingan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan

Pendampingan dari Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman pada Pelatihan Hidroponik di Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat dilihat pada gambar 5.16.



Gambar 5.16. Pendampingan dari Dinas Pertanian Pangan dan perikanan Sleman

Keberadaan Kelompok Wanita Tani Srikandi di kawasan perkotaan dengan lahan yang terbatas, jumlah penduduk yang padat dan heterogen serta hampir seluruh masyarakat tidak mempunyai latar belakang petani, hal ini memerlukan pendampingan dari *stakeholder* dalam melaksanakan *urban farming*.

Keterlibatan Penyuluh Pertanian Lapangan dimulai perencanaan, berjalannya program, pengawasan dan evaluasi. Pemerintah kalurahan Caturtunggal mensuport dengan pendanaan, fasilitasi kegiatan, pendampingan, pengawasan dan evaluasi. Sedangkan bidang ketahanan pangan terlibat lebih intensif setelah KWT terbentuk dengan suport penganggaran

untuk pertemuan, fasilitasi kegiatan serta melakukan pengawasan dan evaluasi *urban farming* yang dilakukan KWT Srikandi.

Pendampingan dari pemerintah Kalurahan Caturtunggal di Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat dilihat pada gambar 5.17.



Gambar 5.17. Pendampingan dari Pemerintah Kalurahan Caturtunggal

Berdasarkan hasil observasi bahwa *urban farming* di KWT Srikandi tidak lepas dari dukungan pemerintah kalurahan Caturtunggal, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman khususnya bidang ketahanan pangan dan pendampingan dari Penyuluh Pertanian lapangan. Sedangkan pendampingnya ke masyarakat dilakukan oleh anggota dan pengurus Kelompok Wanita Tani Srikandi yang merupakan perwakilan dari masing-masing RT. Pendampingan kegiatan *urban farming* di Kelompok Wanita Tani Srikandi oleh Stakeholder dapat dilihat pada gambar 5.18.



Gambar 5.18. Anggota KWT Srikandi dengan Stakeholder pendamping kegiatan

Peran *stakeholder* dalam *urban farming* disesuaikan dengan tugas dan kewenangan masing-masing stakeholder. Penganggaran, fasilitasi sarana prasarana maupun pelatihan hanya menjadi kewenangan instansi teknis dan pemerintah kalurahan yang mengelola anggaran APBD Kabupaten maupun APB Kalurahan. Untuk penyediaan lahan menjadi kewenangan pemerintah kalurahan yang mengelola Tanah Kas Desa (TKD).

Penyuluh Pertanian Lapangan berperan untuk memotivasi dan memberikan penyuluhan kepada KWT kearah pengetahuan, sikap dan ketrampilan, mendampingi proses perencanaan yang diusulkan penganggarnya ke pemerintah Kalurahan atau Dinas dengan melihat potensi maupun permasalahan kelompok.

Pembinaan dan pendampingan dari *stakeholder* selama ini hanya dilakukan di Kelompok Wanita Tani Srikandi dengan jumlah anggota yang terbatas, sehingga untuk sampai ke

masyarakat, anggota kelompok yang akan menyampaikan ke warga di tingkat RT atau RW.

Pengawasan dan evaluasi menjadi peran semua *stakeholder* untuk menjamin bahwa fasilitasi yang diberikan bermanfaat bagi kelompok serta eksistensi kelompok untuk pemanfaatan pekarangan.

Dukungan stakeholder sangat mempengaruhi semangat warga masyarakat untuk melakukan *urban farming*, sehingga kegiatan berkembang dengan baik di masyarakat dan menjadi kegiatan unggulan. Dukungan stakeholder juga mempengaruhi interaksi antar masyarakat dan aparat setempat/ tokoh menjadi lebih erat, saling belajar melalui Kelompok Wanita Tani Srikandi serta mempengaruhi kreatifitas dan inovasi warga dalam mengolah hasil *urban farming*.

Kewenangan stakeholder dalam *urban farming* disesuaikan dengan tugas dan pokok fungsi masing-masing stakeholder. Penyuluh Pertanian Lapangan mempunyai kewenangan untuk menumbuhkan kelompok dengan melaksanakan penyuluhan ke padukuhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian. Kewenangan Pemerintah Kelurahan Caturtunggal bagian Ulu-ulu adalah pemberdayaan masyarakat khususnya pembinaan ke kelompok pertanian, perikanan dan peternakan. Khusus di Kelompok Wanita Tani memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi sarana prasarana. Sedangkan kewenangan bidang Ketahanan pangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan 3 pilar utama yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan konsumsi serta keamanan

pangan. Ketersediaan hubungannya dengan pekarangan, masyarakat di wilayah itu tidak tergantung dengan situasi diluar dan masih tersedia pangan dengan memanfaatkan hasil di pekarangan. Akses keterjangkauan hubungannya dengan kemampuan masyarakat mengakses bahan pangan, barangnya ada dan bisa dibeli, daya belinya ada dan mampu untuk membeli. Di Sleman tidak ada masalah, akses jalan semua terjangkau, dimana mana ada warung. Semua bisa terjangkau dan terakhir konsumsi dan keamanan pangan. Dinas menjamin masyarakat mengkonsumsi pangan beragam berigizi dan seimbang.

Pendampingan dan dukungan dari stakeholder dalam *urban farming* ini dibatasi oleh jumlah anggaran yang bisa diakses baik di kalurahan Caturtunggal maupun bidang Ketahanan Pangan serta jumlah personil penyuluh yang sangat minim serta pergantian personil pendamping di tengah berjalannya kegiatan. Hal ini sangat mempengaruhi keberlanjutan kegiatan di kelompok.

Berdasarkan hasil observasi, *stakeholder* yang terlibat dalam *urban farming* di Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Penyuluh Pertanian Lapangan, mempunyai pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan *urban farming*, tetapi tidak mempunyai kepentingan karena merupakan ketugasan dari penyuluh untuk mendampingi kelompok, sehingga sesuai matriks termasuk dalam *Context Setters (High Power, Low Inters)*

2. Ulu-Ulu Kalurahan Caturtunggal, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keberadaan kelompok, terutama legalitas dan kebijakan lokal dari pemerintah kalurahan dan mempunyai kepentingan terutama untuk melaksanakan program bidang pemberdayaan masyarakat salah satunya adanya pembinaan kelompok tani, sehingga sesuai matriks termasuk *Players (High Power, High Interest)*
3. Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap eksistensi dan keberadaan kelompok dan mempunyai kepentingan agar kegiatan ketahanan pangan dengan pemanfaatan pekarangan melalui KWT dapat terlaksana sesuai program dan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan, sehingga sehingga sesuai matriks termasuk *Players (High Power, High Interest)*

Peran stakeholder dalam *urban farming* di Kelompok Wanita Tani Srikandi Padukuhan Mrican dapat dilihat di tabel 5.3. berikut ini

Tabel 5.3. Peran Stakeholder dalam *urban farming* Kelompok Wanita Tani Srikandi di Padukuhan Mrican

No	Stakeholder	Peran	Kegiatan
1	Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi 2. Fasilitasi 3. Pengawasan dan evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengesahkan kelembagaan Kelompok Wanita Tani Srikandi dan melakukan pembinaan kelembagaan 2. Memberikan penyadaran dan pengkapasitasan dengan berbagai pelatihan <i>urban farming</i> 3. Memfasilitasi sarana prasarana untuk mendukung <i>urban farming</i> 4. Mengawasi dan mengevaluasi <i>urban farming</i>

No	Stakeholder	Peran	Kegiatan
2	Bagian Ulu- Ulu Kalurahan Caturtunggal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi 2. Perencanaan Program 3. Fasilitasi 4. Pengawasan & Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluarkan SK Kepengurusan Kelompok Wanita Tani Srikandi 2. Mengijinkan pemakaian Tanah Kas Desa Caturtunggal untuk demplot kegiatan <i>urban farming</i> 3. Memberikan pembinaan kelembagaan KWT 4. Melaksanakan perencanaan kegiatan melalui Musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan 5. Memberikan pengkapasitasan dengan pelatihan yang berkaitan dengan <i>urban farming</i> 6. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan urban farming 7. Mengawasi dan mengevaluasi urban farming

No	Stakeholder	Peran	Kegiatan
3	Penyuluh Pertanian Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan 2. Motivator 3. Pengawasan dan Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan Kelembagaan Kelompok 2. Memberikan penyuluhan terkait urban farming. 3. Mendampingi Kelompok Wanita Tani Srikandi mulai perencanaan sampai keberlanjutan urban farming 4. Memotivasi Kelompok dalam pengembangan urban farming 5. Mengawasi dan mengevaluasi urban farming

e. Proses Pemberdayaan Masyarakat melalui *urban farming* oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi

Urban farming di padukuhan Mrican dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahap pemberdayaan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Proses pemberdayaan masyarakat tidak lepas peran serta dari masyarakat, tokoh masyarakat (Dukuh, RT dan RW), Kelompok Wanita Tani Srikandi dan instansi pemerintah yaitu kalurahan Caturtunggal, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan maupun Penyuluh Pertanian Lapangan.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui *urban farming* di padukuhan Mrican yaitu

a. Proses Penyadaran.

Proses penyadaran dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan dari fasilitator kepada penerima manfaat.

1). Pengetahuan *kognitif*: Pertemuan/sharing

Tahap penyadaran masyarakat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi oleh instansi pemerintah dengan melibatkan tokoh masyarakat, selanjutnya dilakukan pembinaan untuk mengenalkan *urban farming* oleh pemerintah kalurahan, penyuluh pertanian lapangan ke masyarakat. Pembinaan selanjutnya dilakukan oleh

Kelompok Wanita Tani Srikandi, RT, RW dan dukuh yang turun langsung ke masyarakat. Heterogenya warga perkotaan di Padukuhan Mrican dengan berbagai profesi dan jumlah penduduk yang sangat padat, keterbatasan sumber daya alam, belum semua warga bergerak untuk melakukan pemanfaatan pekarangan, maka proses penyadaran dilakukan sejak awal rintisisan kegiatan dan masih terus dilakukan sampai saat ini.

Diawal penyadaran ke masyarakat, kegiatan dipusatkan di rumah dukuh, setelah terbangunnya demplot, kegiatan dipusatkan di demplot dan diseluruh wilayah padukuhan. Kegiatan masyarakat sebelum adanya *urban farming* adalah mengelola kontrakan/ kos-kosan, berdagang, membuka warung/ toko, pegawai swasta, PNS, buruh dan IRT. Ibu-ibu tidak banyak yang bergabung di kegiatan masyarakat. Warga kurang peduli dengan lahan yang ada di pekarangan dan belum memanfaatkan untuk penghijauan serta membiarkan mangkrak, karena lahan di padukuhan Mrican sangat sempit yang sebagian besar digunakan untuk permukiman, bahkan tidak menyisakan untuk penghijauan. Penyadaran untuk melakukan penghijauan di pekarangan rumah maupun lahan-lahan kosong di padukuhan Mrican merupakan materi utama dalam sosialisasi dan pembinaan.

- 2). *Believe*. Tahap penyadaran agar masyarakat tergerak, percaya, yakin dan merasakan manfaat *urban farming* dilakukan dengan adanya lomba pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW. Lomba ini merupakan inisiatif dari

dukuk agar *urban farming* ngremboko ke masyarakat yang diselenggarakan mulai tahun 2016. Lomba dilanjutkan oleh KWT Srikandi sebagai agenda rutin setiap 2 tahun sekali. Masyarakat semakin antusias untuk melakukan *urban farming* di pekarangan maupun lahan yang kurang produktif di masing-masing RW. Pada tahap penyadaran ini melibatkan dukuh, pengurus KWT Srikandi, RW, RT serta warga masyarakat.

Lomba pemanfaatan Pekarangan terbatas antar RW tahun 2020 di Paduuhan Mrican dapat dilihat pada gambar 5.19.



Gambar 5.19. Pemenang lomba pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW

- 3). *Healing*. Kekhawatiran masyarakat terhadap *urban farming* muncul di warga, mengingat Sumber daya alam (lahan, tanah) tidak mendukung atau sulit didapatkan dilokasi serta warga yang tidak mengetahui cara menanam dan takut gagal.

Tahap penyadaran untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap *urban farming* dilakukan Dukuh Mrican dengan memberi contoh pemanfaatan lahan pekarangan rumah dan pagar dengan berbagai tanaman sayuran ditengah keterbatasan lahan, media dan cara budidaya. Dukuh juga membagi berbagai benih dan bibit ke warga secara gratis, selanjutnya dukuh juga merintis lomba pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW. Dengan kegiatan yang sudah dilakukan dan memberikan manfaat mengurangi kekhawatiran masyarakat dan banyak yang akhirnya mengikuti program kegiatan tersebut. Kekhawatiran semakin berkurang dengan terbentuknya KWT Srikandi dan mengolah demplot di lahan yang tidak produktif, menjadikan warga semakin tertarik dan antusias untuk menanam dengan segala keterbatasan yang ada.

Upaya penyadaran yang dilakukan oleh tokoh masyarakat maupun Kelompok Wanita Tani Srikandi sebagai pelaksana kegiatan, ternyata beberapa masyarakat masih belum tergerak melakukan dan masih diliputi kekhawatiran karena sebagian besar masyarakat padukuhan Mrican tergantung penghasilannya dari usaha pemondokan/ kos-kosan maupun usaha dagang, mengingat strategisnya wilayah untuk usaha tersebut, sehingga warga memilih memanfaatkan lahan untuk dibangun pemondokan atau tempat usaha daripada untuk pengembangan *urban farming*.

Dari hasil observasi bahwa kesadaran masyarakat untuk *urban farming* sudah cukup tinggi. Kegiatan menanam dengan memanfaatkan pekarangan rumah maupun di ruang publik sudah menjadi kebiasaan warga, warga secara swadaya mengembangkan kegiatan tersebut. Kesadaran masyarakat semakin tinggi setelah adanya lomba pemanfaatan pekarangan antar RW, antusias warga untuk menghijauan pekarangan dan wilayahnya cukup tinggi. Keterlibatan warga untuk menyediakan wilayah yang asri dengan tanaman produktif hampir di semua elemen. Tetapi masih ada juga warga khususnya pendatang yang diperlukan pembinaan terus menerus. Hal ini karena jumlah penduduk yang cukup tinggi, luasnya wilayah dan heterogennya warga Mrican dan keterbatasan sumber daya alam.

b. Proses Pengkapasitasan

Pengkapasitasan *urban farming* kepada masyarakat Padukuhan Mrican dilakukan pengurus dan anggota Kelompok Wanita Tani Srikandi yang telah menerima pengkapasitasan dari instansi pemerintah. Pengkapasitasan yang dilakukan pemerintah kalurahan maupun dinas, terbatas jumlah peserta karena kuota sudah ditentukan sebelumnya, sehingga secara berjenjang, anggota kelompok harus menyampaikan kepada masyarakat melalui forum lebih kecil di tingkat RT maupun RW.

1) Pengkapasitasan Manusia

Pengkapasitasan manusia pada *urban farming* dilakukan dengan berbagai pelatihan. Materi pelatihan tentang teknik atau cara budidaya tanaman di lahan terbatas, pembibitan, pelatihan budidaya jamur tiram, pelatihan hidroponik, pelatihan olahan pisang dan berbagai pelatihan yang lain. Pelatihan yang diterima oleh Kelompok akan disampaikan kepada masyarakat oleh perwakilan kelompok sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

Pengkapasitasan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang cara penanaman/ budidaya di lahan terbatas dengan berbagai keterbatasan sumber daya alam. Masyarakat sebagai penerima manfaat memberikan respon yang cukup baik dengan mempraktekkan hasil pelatihan di pekarangan, gang ataupun di lahan yang mereka miliki baik secara pribadi maupun berkelompok. Pelatihan pembuatan media tanam di Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat dilihat pada gambar 5.20.



Gambar 5.20. Pelatihan Pembuatan Media Tanam bagi KWT Srikandi

2) Pengkapasitasan Usaha

Urban farming yang telah dilaksanakan oleh masyarakat maupun anggota kelompok membuka peluang usaha yang lain dengan memanfaatkan bahan baku pertanian yang dihasilkan untuk menambah nilai dari produk. Peluang usaha mulai dilirik oleh masyarakat tetapi terkendala dengan keterbatasan bahan baku maupun kemampuan dalam hal pengolahan hasil.

Pengkapasitasan usaha dilakukan dengan berbagai pelatihan pengolahan hasil pertanian, pelatihan pembuatan pupuk organik, pembuatan media tanam maupun pelatihan pengemasan untuk menambah nilai dari produk yang dihasilkan. Mulai tahun 2017 Kelompok Wanita Tani Srikandi mulai mendapatkan pelatihan pengolahan pisang, pengolahan jamur, dan setelah adanya program KRPL mendapatkan berbagai pelatihan pengembangan usaha dari *stakeholder* pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi yang selanjutnya akan disampaikan ke masyarakat oleh anggota kelompok.

Pengkapasitasan usaha dengan Pelatihan di Kelompok Wanita Tani Srikandi di dapat dilihat di gambar 5.21.



Gambar 5.21. Pelatihan olahan hasil pertanian di KWT Srikandi

3) Pengkapasitasan Lingkungan

Pengkapasitasan lingkungan dilakukan di masyarakat dengan memberikan pemahaman ke masyarakat sejak awal rintisan kegiatan terkait fungsi dan manfaat *urban farming* untuk penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di pekarangan maupun lahan kurang produktif yang dulu banyak dimanfaatkan untuk pembuangan sampah. Pelatihan pengolahan sampah organik dan pelatihan pembuatan komposter sampah rumah tangga (Takakura) yang sudah dihasilkan di RW 06 Mrican. Hasil dari pelatihan ini dapat dimanfaatkan untuk *urban farming* di tingkat rumah tangga. Tetapi memang belum semua warga masyarakat bisa mengelola sampah organik dirumah tangga untuk dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman.

Urban farming ini secara sosial dapat mempererat kerjasama, gotong royong dan kepedulian di masyarakat perkotaan, sehingga warga saling mengenal dan berinteraksi.

Dari hasil observasi ketrampilan masyarakat Padukuhan Mrican dalam *urban farming* sudah cukup baik. Saat ini dengan keterbatasan media dan lahan, masyarakat sudah bisa memanfaatkan lahan dengan berbagai tanaman produktif, yang sebelumnya warga tidak mengetahui teknis budidaya karena sebagian besar tidak ada latar belakang petani, tetapi warga tetap antusias untuk belajar dengan aktif mengikuti pelatihan yang diberikan KWT Srikandi, sehingga hampir semua warga sudah bisa melakukan kegiatan budidaya di lahan terbatas, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi dengan pelatihan untuk meningkatkan pengembangan *urban farming*.

Pengkapasitasan lingkungan dengan Pelatihan pengolahan limbah di Padukuhan Mrican dapat dilihat di gambar 5.22.



Gambar 5.22. Pelatihan Pengolahan Limbah di Padukuhan Mrican

c. Proses Pendayaan/Pemberian daya

Pelaksanaan *urban farming* di Padukuhan Mrican sudah pada tahapan proses pendayaan/ pemberian daya yaitu dengan memberikan kewenangan kepada warga masyarakat untuk bisa berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan kegiatan ini di wilayahnya masing-masing serta mempraktekkan hasil pengkapasitasan yang telah dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi tanpa tergantung bantuan dari pihak lain.

Proses pendayaan masyarakat dimulai sejak dirintis lomba pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW setiap 2 tahun sekali yang telah dilaksanakan mulai tahun 2016, 2018 dan tahun 2020. Masyarakat tanpa menunggu dan bantuan dari pihak lain melakukan kegiatan *urban farming* di wilayah pekarangan masing-masing maupun lahan yang mulai dimanfaatkan untuk lokasi penanaman. Setiap pelaksanaan lomba selalu ada tematik penilaian yang menjadi indikator pengembangan *urban farming*, hal ini untuk mewujudkan komitmen dan eksistensi warga dalam menjalankan *urban farming* di tengah masyarakat.

Wewenang yang diberikan ke masyarakat yaitu kebebasan warga untuk menentukan jenis tanaman, teknis mengolah lahan, teknis pengolahan hasil *urban farming*.

Berdasarkan hasil obervasi bahwa keterbatasan lahan dan sumber daya alam di Padukuhan Mrican, menuntut warga untuk lebih kreatif dan inovatif mengelola lahan dan pekarangan yang ada untuk melaksanakan *urban farming*. Kegiatan lomba

pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW memacu kreatifitas warga dengan memanfaatkan barang yang tidak bermanfaat menjadi layak pakai serta menciptakan ide ide baru dalam budidaya dilahan terbatas.

3. Kemandirian masyarakat pada *urban farming*

Urban farming di padukuhan Mrican sudah dilaksanakan sebagian besar warga secara swadaya mandiri dengan memanfaatkan segenap potensi dan sumber daya alam yang. Kemandiria masyarakat sudah terlihat dalam *urban farming* ini.

Kemandirian terbentuk di semua elemen masyarakat sejak adanya lomba pemanfaatan pekarangan terbatas antar RW yang dilakukan di Padukuhan Mrican. Masyarakat secara swadaya dan mandiri melakukan penanaman di pekarangan masing-masing dan setelah dirintis lomba pemanfaatan pekarangan masyarakat lebih antusias melaksanakan *urban farming*.

Kemandirian terbentuk karena warga merasakan manfaat dari *urban farming*, sehingga masyarakat tidak tergantung dari KWT maupun tokoh masyarakat untuk mengembangkan. *Urban Farming* menjadi kegiatan yang sudah tidak bisa diucapkan, tetapi dilaksanakan. Sesuai Misi KWT Srikandi Maju Tanpa Menunggu.

Kemandirian yang diharapkan terbentuk pada masyarakat dalam *urban farming* ini antara lain:

a. Kemandirian Perilaku

Urban farming yang telah dilaksanakan masyarakat pelan-pelan merubah perilaku masyarakat menjadi guyub dan rukun, terjalannya kerjasama yang semakin

erat dengan warga lainnya, meningkatnya sikap gotong royong di masyarakat perkotaan, hal ini berbeda dengan sebelum adanya *urban farming* yang sebagian besar warga di perkotaan tidak saling mengenal dan tidak peduli satu sama lain. Selain itu dengan adanya demplot *urban farming*, anggota dan warga semakin pintar untuk berbicara dengan orang lain, warga berani mengambil keputusan untuk melakukan program *urban farming* dan tidak tergantung pada pihak lain.

Dari hasil observasi bahwa *urban farming* mempengaruhi perilaku masyarakat di Padukuhan Mrican. Di tengah masyarakat perkotaan yang beragam, warga saling mengenal satu sama lain, saling bekerja sama dan gotong royong untuk bisa menjalankan program. Hubungan warga masyarakat semakin baik dan tidak bersikap egois. Warga saling belajar, bertanggungjawab dan saling menghargai satu sama lain untuk keberhasilan *urban farming* di Padukuhan Mrican. Kemandirian perilaku masyarakat semakin baik.

b. Kemandirian Nilai

Kemandirian nilai yang dimaksud adalah warga masyarakat mengetahui prinsip benar/ salah, penting/ tidak penting dari kegiatan yang dilaksanakan. *Urban farming* di padukuhan Mrican dengan berproses mempengaruhi tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Sebagian besar masyarakat sudah mengelola lingkungan dengan baik dan semakin jarang ditemui lahan yang dibiarkan untuk penumpukan sampah,

pembakaran sampah sudah jarang ditemui, kebiasaan warga BAB di sungai juga sudah tidak ditemukan. Warga juga mengetahui pentingnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau dengan melakukan *urban farming* di pekarangan masing-masing dan pentingnya memanfaatkan sampah organik dikelola menjadi pupuk. Selain itu dari nilai sosial terutama pentingnya tali silaturahmi antara warga yang semakin erat dan tumbuh di masyarakat.

Dari hasil observasi bahwa *urban farming* mempengaruhi kemandirian nilai-dalam masyarakat. Munculnya kesadaran masyarakat untuk peduli pada kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nilai kepedulian dalam diri masyarakat terlihat dengan kebiasaan warga yang sudah mulai berubah terhadap lingkungannya. Nilai sosial masyarakat terlihat gerakan-gerakan masyarakat untuk pengelolaan lingkungan dan dukungan warga terhadap program pemerintah sehingga warga rela berkorban untuk penataan kawasan di bantaran sungai.

c. Kemandirian Ekonomi

Kemampuan masyarakat untuk mengatur ekonominya sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain merupakan indikator kemandirian ekonomi. Dalam *urban farming* di padukuhan Mrican, kemandirian ekonomi belum terlihat signifikan, karena sebagian besar hasil panen masih dimanfaatkan untuk dikonsumsi sendiri guna peningkatan gizi ditingkat keluarga, tetapi *urban farming* ini dapat mengurangi pengeluaran keluarga, walaupun sudah ada

warga yang melakukan pengolahan untuk menambah nilai dari produk tersebut, atau melakukan usaha dari *urban farming*, tetapi hasil dari usaha tersebut belum bisa menjadi penyangga ekonomi warga. Hal ini karena sebagian besar warga sudah mempunyai aktivitas ekonomi sendiri baik dengan usaha pemondokan ataupun usaha lainnya, sehingga kegiatan *urban farming* lebih pada kemandirian perilaku dan nilai.

Dari hasil observasi bahwa *urban farming* di Padukuhan Mrican belum signifikan mempengaruhi kemandirian ekonomi terutama untuk menambah penghasilan atau pendapatan masyarakat, karena sebagian besar warga sudah mempunyai pekerjaan utama untuk menopang perekonomian keluarga. Kegiatan *urban farming* ini menjadi aktivitas sampingan maupun sekedar menyalurkan hobi dan menjadi wadah untuk saling berinteraksi. *Urban farming* yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk pembelian sayuran karena sudah disediakan di pekarangan.

4. Keberlanjutan *Urban Farming*

Proses pemberdayaan diharapkan adanya keberlanjutan dengan berkurangnya pendampingan dari pihak luar dan masyarakat melestarikan program sebagai kegiatan rutinitas yang bermanfaat. Keberlanjutan *urban farming* di padukuhan Mrican dibutuhkan tokoh atau sosok seperti dukuh maupun pengurus KWT Srikandi yang menjaga komitmen untuk menjalankan *urban farming*.

Event rutinitas dimasyarakat seperti lomba atau kompetisi dilakukan di wilayah perkotaan sebagai salah satu cara agar kegiatan berkelanjutan dan lestari dengan keswadayaan masyarakat dan tidak tergantung dari pendampingan pihak pemerintah maupun lainnya. Komitmen dan motivasi sangat dibutuhkan dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian *urban farming*.

Dari hasil observasi bahwa pendampingan *urban farming* di Padukuhan Mrican dari instansi pemerintah maupun dari Kelompok Wanita Tani Srikandi sudah mulai berkurang, bahkan masyarakat dan anggota kelompok secara mandiri dan swadaya mengusahakan pekarangan rumah masing-masing, lahan dan gang yang bisa dimanfaatkan untuk *urban farming*. Masyarakat melestarikan *urban farming* secara rutin menanam sayuran maupun tanaman produktif lainnya sepanjang tahun disesuaikan dengan musim tanam dan cuaca. Salah satu laporan penanaman yang dilakukan masyarakat di pekarangan sampai musim tanam tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 5.23.



The image shows an open notebook with handwritten entries in a table format. The table has several columns, likely representing different stages or types of planting. The text is written in Indonesian. The entries include dates and descriptions of planting activities, such as 'tanam' (planting) and 'panen' (harvest). The notebook is placed on a dark surface.

Gambar 5.23. Laporan penanaman pekarangan rumah warga

Keberlanjutan *urban farming* di Kelompok Wanita Tani Srikandi juga sudah terlihat dari program kerja tahunan yang secara rutin dibuat dan dilaksanakan oleh anggota serta data jumlah tanaman dan hasil panen yang dilakukan di demplot kelompok secara rutin. Program kerja *urban farming* tahun 2022 Kelompok Wanita Tani Srikandi dapat dilihat pada gambar 5.24.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okta	Nov	Dek
1. Kegiatan												
2. Rapat												
3. Pelatihan												
4. Kegiatan												

Program Kerja dengan Kegiatan
dan hasil panen
1. Rapat
2. Pelatihan
3. Kegiatan yang lain

Gambar 5.24. Program Kerja Kelompok Wanita Tani Tahun 2022

Kegiatan *urban farming* di Demplot Kelompok Wanita Tani Srikandi bulan Maret dan April tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 5.25.

Bulan Maret		Bulan April	
No	Kegiatan	No	Kegiatan
1	Kegiatan	1	Kegiatan
2	Rapat	2	Rapat
3	Pelatihan	3	Pelatihan
4	Kegiatan	4	Kegiatan
5	Kegiatan	5	Kegiatan
6	Kegiatan	6	Kegiatan

Gambar 5.25. Kegiatan *urban farming* Kelompok Wanita Tani Srikandi Bulan Maret-April 2022

Data jenis tanaman dan data panen didemplot Kelompok

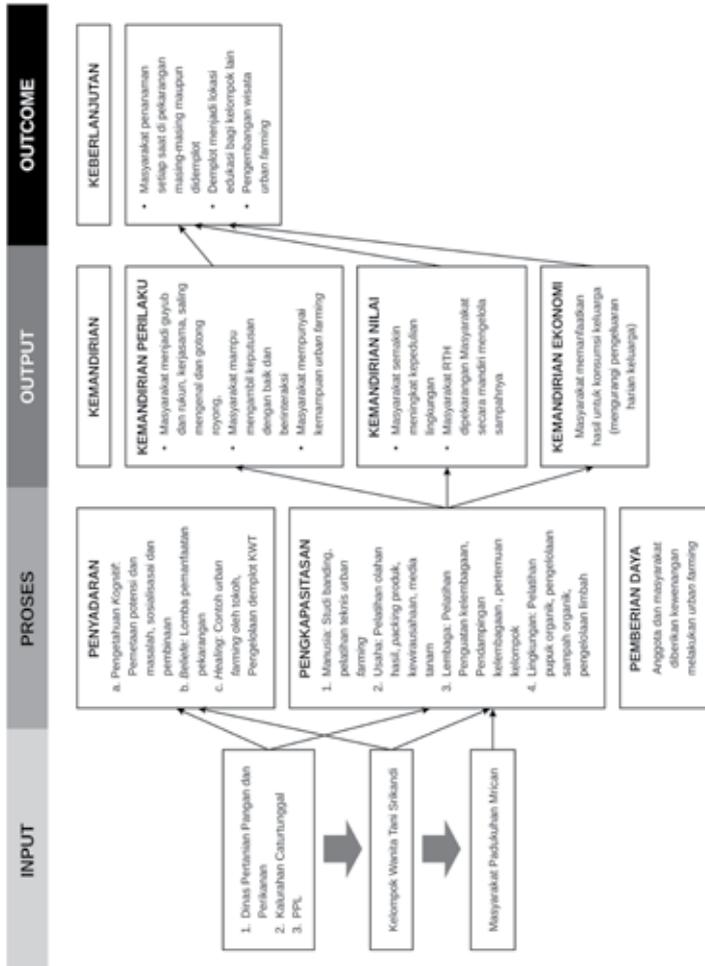
Wanita Tani Srikandi dan hasil panen tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 5.26.



No. Urut	Jenis Tanaman	Luas Tanam	Jumlah Panen	Grafik
1	Tomat	10 m ²	10 kg	
2	Bayam	10 m ²	10 kg	
3	Kacang Panjang	10 m ²	10 kg	
4	Kacang Tanah	10 m ²	10 kg	
5	Kacang Hijau	10 m ²	10 kg	
6	Kacang Merah	10 m ²	10 kg	
7	Kacang Putih	10 m ²	10 kg	
8	Kacang Buncis	10 m ²	10 kg	
9	Kacang Kacang	10 m ²	10 kg	
10	Kacang Garuda	10 m ²	10 kg	
11	Kacang Garuda	10 m ²	10 kg	
12	Kacang Garuda	10 m ²	10 kg	
13	Kacang Garuda	10 m ²	10 kg	
14	Kacang Garuda	10 m ²	10 kg	
15	Kacang Garuda	10 m ²	10 kg	
16	Kacang Garuda	10 m ²	10 kg	
17	Kacang Garuda	10 m ²	10 kg	
18	Kacang Garuda	10 m ²	10 kg	
19	Kacang Garuda	10 m ²	10 kg	
20	Kacang Garuda	10 m ²	10 kg	

Gambar 4.26. Data Jenis tanaman dan panen tahun 2022

Proses Pemberdayaan Masyarakat pada *urban farming* oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi di Padukuhan Mrican dapat dilihat pada gambar 5.27.



Gambar 5.27

Urban farming merupakan kegiatan unggulan di Padukuhan Mrican, tetapi masih ditemukan warga yang belum bergerak untuk melakukan kegiatan penanaman terutama di pekarangan rumah masing-masing. Komitmen Kelompok Wanita Tani Srikandi sebagai pelaksana kegiatan dihadapkan dengan berbagai permasalahan di wilayah. Masyarakat di Padukuhan Mrican menempati hampir semua lahan di sepanjang bantaran sungai maupun di kawasan perdagangan dan area pendidikan baik untuk hunian/ permukiman maupun usaha, sehingga lahan yang bisa dimanfaatkan untuk *urban farming* sangat terbatas dan lahan hampir semua dimanfaatkan untuk bangunan. Sebagian besar wilayah dihuni oleh warga pendatang dari wilayah lain, sehingga masyarakat padukuhan Mrican sangat heterogen baik profesi/pekerjaan, budaya, tingkat pendidikan maupun ekonominya. Menurut Jamaludin (2017), menyatakan bahwa masyarakat kota, anggota-anggotanya berpisah-pisah, saling tidak kenal, dan lebih terikat kontak kekeluargaan, hubungannya serba lugas, lepas dari pribadi dan sentimen serta ikatan tradisi dengan tanpa kepemimpinan mapan. Ciri-ciri masyarakat kota adalah heterogenitas sosial. Dampak kepadatan penduduk kota, maka timbul beberapa persaingan dalam kehidupannya baik perumahan, ekonomi, politik, status sosial, dan lain-lain. Toleransi sosial

Urban farming di beberapa masyarakat berbenturan dengan kebutuhan ekonomi warga yaitu lebih menjanjikan apabila lahan dimanfaatkan untuk usaha pemondokan/ kos-kosan maupun usaha lainnya dibandingkan untuk *urban farming*. Menurut

Jamaludin (2017), pertumbuhan maupun perkembangan yang terjadi pada suatu kota sangat mempengaruhi kinerja dari pusat kota. Semakin luas suatu kota, semakin besar “beban” yang ditanggung oleh pusat kota, hal tersebut berdampak langsung terhadap perkembangan pemanfaatan lahan yang semakin terbatas di pusat kota.

Kondisi tersebut mengakibatkan *urban farming* belum optimal dilaksanakan semua warga padukuhan Mrican dan *urban farming* yang menjadi unggulan di Kelompok Wanita Tani Srikandi belum bisa diwujudkan secara keseluruhan, walaupun sebagian warga memanfaatkan lahan publik untuk melaksanakan *urban farming* ini. Oleh karena itu Kelompok Wanita Tani Srikandi sebagai pelaksana *urban farming* di masyarakat sebaiknya terus meningkatkan kesadaran warga melalui sosialisasi ke masyarakat melalui forum- forum pertemuan warga di tingkat paling kecil (RT) yang melibatkan semua elemen masyarakat baik anak-anak sampai orang tua. Anggota KWT Srikandi terus memberikan pembinaan, pendampingan dan peningkatan ketrampilan tentang *urban farming* kepada warga yang bukan anggota kelompok melalui pertemuan dan berbagai pelatihan ketrampilan secara mandiri dengan melibatkan pendampingan dari Penyuluh Pertanian Lapangan, sehingga pada saat ada kesulitan, masyarakat bisa mendapatkan solusinya.

Urban farming di masyarakat padukuhan Mrican dilaksanakan dengan berbagai kendala antara lain jumlah penduduk yang padat, tipe masyarakat yang heterogen dengan berbagai keterbatasan lahan yang diusahakan dan kondisi

wilayah di 9 RW yang beragam dan potensi serta permasalahan yang berbeda-beda dibutuhkan komitmen yang tinggi dari semua masyarakat untuk tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan awal. Sinergi/ kerjasama antar semua elemen masyarakat, masyarakat dengan stakeholder baik yang bergerak di bidang pendidikan maupun usaha sangat dibutuhkan untuk keberhasilan kegiatan. *Urban farming* di Padukuhan Mrican juga terkendala pengetahuan terkait teknis yang belum merata ke seluruh warga. Hal ini mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang sebagian masih seadanya belum memecahkan permasalahan dan belum melihat potensi masing-masing wilayah RW.

Pelaksanaan *urban farming* juga perlu ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat karena *urban farming* ini tidak hanya membudidayakan tanaman tetapi memproses, memproduksi dan memasarkan hasil pertanian dengan menerapkan metode-metode yang intensif untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan pengelolaan lingkungan

Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam penyelenggaraan *urban farming* mengakibatkan kegiatan hanya akan berjalan apa adanya tidak mengembangkan potensi dan bukan menjadikan solusi untuk penyelesaian suatu permasalahan. Tanpa adanya komitmen dan sinergitas dari masyarakat dan Kelompok Wanita Tani Srikandi sebagai pelaksana maka kegiatan hanya akan jalan ditempat, berjalan sendiri-sendiri dan masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang sudah dikembangkan. Kegiatan tidak didukung dengan kemampuan dan ketrampilan *urban farming*

mulai dari produksi sampai pemasaran maka tidak akan lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Dadie, dkk (2016), menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini berarti semakin tingginya komitmen organisasi yang ditunjukkan karyawan dalam perusahaan akan menjadikan kinerja karyawan semakin baik. Menurut Deardroff dan Wiliiam dalam Ginanjar (2015), sinergitas adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan dari pengaruh mereka secara individu. Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama.

Kelompok Wanita Tani Srikandi sebagai pelaksana kegiatan, harus menjaga komitmen anggotanya dalam menjalankan *urban farming* dengan menciptakan suasana harmonis dalam kelompok, berjalan sesuai dengan tujuan yang sama sesuai visi misi kelompok dan menumbuhkan rasa cinta dan bangga anggota pada kelompok. Sosok pemimpin yang mau mengayomi anggota dan mampu bersinergi atau bekerja sama dengan pihak lain sangat dibutuhkan untuk menciptakan inovasi dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan warga masyarakat dalam menjalankan *urban farming* dengan berbagai keterbatasan.

Tujuan *urban farming* khususnya untuk memberikan penghasilan tambahan bagi penduduk kota, di Padukuhan

Mrican belum terlihat dari hasil kegiatan ini, tetapi lebih pada tujuan hubungan sosial masyarakat, pengelolaan lingkungan dan pemenuhan pangan bagi keluarga. Hasil *urban farming* terbatas baik variasi tanaman maupun jumlah hasilnya serta variasi produk olahannya. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah intensifikasi lahan pekarangan terbatas dengan penerapan teknologi pertanian, inovasi dan kreatifitas masyarakat untuk mengolah lahan pekarangan agar produksinya cukup untuk dijual.

Tokoh masyarakat maupun Kelompok Wanita Tani Srikandi sebagai pelaksana kegiatan terus berupaya untuk menumbuhkan kesadaran, tetapi beberapa masyarakat masih belum bergerak melakukan dan masih diliputi kekhawatiran karena sebagian besar masyarakat padukuhan Mrican tergantung penghasilannya dari usaha pemondokan/ kos-kosan maupun usaha dagang, mengingat strategisnya wilayah untuk usaha tersebut, sehingga warga memilih memanfaatkan lahan untuk dibangun pemondokan atau tempat usaha daripada untuk pengembangan *urban farming*. *Urban farming* di Padukuhan Mrican merupakan kegiatan unggulan yang di beberapa lokasi berbenturan dengan kepentingan warga terutama penghasilan warga yang tergantung pada usaha pemondokan/ kos-kosan serta usaha lainnya yang sama-sama memanfaatkan lahan karena wilayah padukuhan Mrican yang sangat strategis untuk usaha tersebut ditengah terbatasnya lahan, hal ini menjadi tantangan bagi Kelompok Wanita Tani Srikandi sebagai

pelaksana kegiatan untuk bisa melaksanakan *urban farming* di semua wilayah.

Menurut Jamaludin (2017), pada zaman modern, kota menjadi pusat industri, produksi, dan jasa. Pada dasarnya, kota terbentuk karena diikuti dengan kepadatan penduduknya. Penyebab kepadatan penduduk terjadi karena ada aktivitas tertentu yang menyebabkan orang-orang berdatangan. Kota dapat dipandang sebagai gaya hidup, yang memungkinkan penduduknya berkontak dengan orang asing, mengalami berbagai perubahan pesat, dan perubahan mobilitas sosial.

Kekhawatiran juga terjadi karena masyarakat padukuhan Mrican sebagian besar adalah warga pendatang yang tidak mempunyai latar belakang pertanian, sehingga warga sudah dihantui oleh kegagalan dalam penanaman. Keterbatasan sumber daya alam yang sulit didapat di wilayah Padukuhan Mrican menjadi kekhawatiran *urban farming* bisa dilaksanakan seluruh warga. Menurut Parsudi (2019), masalah yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pertanian kota (*urban farming*) kebanyakan secara berurutan adalah terserang hama penyakit tanaman, kekurangan modal untuk mengembangkan, adanya hambatan akibat cuaca ekstrim dan kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam usaha pertanian kota.

Munculnya kekhawatiran dalam masyarakat mengakibatkan *urban farming* yang sudah dilaksanakan oleh warga masyarakat tidak akan bertahan lama dan sulit berkelanjutan dan lesatari di Padukuhan Mrican. Oleh karena itu sangat diperlukan komitmen Kelompok Wanita Tani Srikandi dan pemangku wilayah untuk

pelaksana *urban farming* dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta dibutuhkan contoh dan kegiatan yang nyata yang dapat dirasakan warga manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achermann, F & Eden, C. 2011. *Strategic Mangement of Stakeholders; Theory and Practice*. Long Range Planning 44 (2011) 179e196. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/222804628> (diunduh 9 Agustus 2021)
- Ayuso, S., Rodriguez, M.A., Garcia, R. & Arino, M.A. 2006. *Maximizing Stakeholders' Interest: An Empirical Analysis of the Stakeholder Approach to Corporate Governance*. IESE Berdasarkan Preferensi Masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Tugas Akhir. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
- Chambers, Robert. 1995. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Yogyakarta : LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial).
- Freeman, R.E. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Marshfield: Pitman Publishing Inc
- Gottdiener, Mark dan Ray Hutchison. 2011. *The New Urban Sociology*. Philadelphia: Westview Press. Hal 49—55.
- Gunawan, I. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif teori dan Praktik*. Jakarta PT. Bumi Aksara.
- Handayani, F & Warsono, 2017. *Analisis Peran Serta Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di*

- Kabupaten Rembang*. <https://ejournal3.undip.co.id> > jppmr > article > view. (Diunduh 13 Agustus 2021).
- Hutabarat, Y, N. 2019. *Strategi Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) Berbasis Kemitraan di Kelurahan 2 Ilir Kota Palembang*. Skripsi. Prodi Agribisnis. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Jamaludin, N.A, 2017. *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung. CV. Pustaka Setia
- Jaya, I, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Quadrant.
- Junainah, W, Kanto, S & Soenyono. *Program Urban Farming Sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Kalurahan Keputih Kecamatan Sukolla Kota Surabaya)*. Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 19, No. 3 (2016) ISSN : 1411-0199. <https://media.neliti.com> > Media > Publications. (diunduh 13 Agustus 2021)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Pedoman Pelaksanaan Pertanian Perkotaan (Urban Farming)*. Jakarta. Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Direktorat Pengelolaan Sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mardikanto, T dan Soebiato P. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung .CV. Alfabeta.

- Mougeot, LucJ.A. 2000. *UrbanAgriculture: Definition, Presence,Potentials and Risks, and Policy Challenges*. InternationalDevelopment Research Centre(IDRC).
- Mulyadi, M. 2015. *Mewujudkan Kemandirian Lokal Melalui Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lorong di Kota Makasar*. Jurnal Kebijakan Pembangunan. Volume 12 Nomor 2 Desember 2017: 179 – 188. <https://jkpjurnal.kalselprov.go.id/index.php/menu/article/view/102/64>. (Diunduh 22 Agustus 2021)
- Murdiyanto, E. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*.Yogyakarta. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press
- Nguyen, N.H., Skitmore, M. & Wong, J.K.W. 2009. Stakeholder Impact Analysis of Infrasrtucture Project Management in Developing Countries: A Study of Perception of Project Managers in State-Owned Engineering Firm in Vietnam. *Construction Management and Economics*, 27(11): 1129-1140.
- Noor, M. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, Juli 2011.<https://journal.upgris.ac.id/civis/article/view>. (diunduh 9 Agustus 2021)
- Parsudi, Setyo. 2019. Model, Motivasi Dan Kendala Masyarakat Dalam Melakukan Pertanian Kota (Urban Farming) Di Kota Surabaya. *Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis* ISSN 2301-8607 (cetak) , ISSN 2599-0365 (online) .
- Permana, Y, Effendy L &Billah, T.M. 2020. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Pemanfaatan Lahan

- Pekarangan Menuju Rumah Pangan Lestari di Kecamatan Cikedung Indramayu. *Jurnal Inovasi Pertanian*. Vol.1 No.3 Agustus 2020. <http://THESIS/JURNAL%20THESIS/Jurnal%20kwt202.pdf>. (diunduh 10 Juli 2021).
- Purwantini, B.T, Saptana, S & Suharyono, S. 2012. *Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kabupaten Pacitan: Analisis Dampak dan Antisipasi ke depan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 1, No 3 (2012).<http://ejournal.Litbang.Pertanian.go.id/index.php/akp/article/new/4090>. (diunduh 3 September 2021)
- Prihatin, B.R, 2015. *Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta)*. *Jurnal DPR RI* Vol 6 No. 2 (2015). <http://junral.dpr.go.id/aspirasi/article/view/pdf>. (Diunduh 3 September 2021)
- Rambe, N. 2014. *Konsep Urban Farming (Pertanian Perkotaan)*. <http://novisanriarambe.blogspot.co.id/2014/07/konsep-urban-farmingpertanian-perkotaan.html>. (Diunduh 5 September 2022)
- Rayuddin . 2018. *Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Agribisnis*. Bandung. Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Rindi, Juliarti. 2019. *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Di PT PIR (Peningkatan Investasi Riau) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat* . UIN Sunan Kalijaga.
- Riskiyah, H. 2018. *Analisis Stakeholder dalam Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten*

- Jember*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Unoversitas Jember. Jember
- Salim & Syahrums. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Ciptapustaka Media.
- Sedana, G. 2020. *Urban Farming sebagai Pertanian Alternatif dalam Mengatasi Masalah Ekonomi pada Masa dan Pasca Pandemi Covid 19*. Seminar Nasional yang bertemakan yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra di Denpasar. Bali. 26 Mei 2020
- Soetomo. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinhk Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sulastri. 2017. *Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Objek Wisata Kebun Raya Massen Rempulu Enrekang*. Skripsi. Prodi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Muhammadiyah Makasar. Makasar
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV.Afabeta.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2007. *Urbanisasi, Mobilitas dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia*. <http://robbyalexandersirait.wordpress.com>, diakses pada 8 Desember 2023.
- Wrihatnolo,Randy R dan Riant Nugroho Dwidjowijoto.2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan untuk pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Yunus, Suadi dan Fadli. 2017. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Aceh. Bandar Publishing.

TENTANG PENULIS

Isti Fajarah, Lahir di Sleman, 19 Mei 1979.

Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Memperoleh gelar SP dari Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2000), dan gelar M.M.A dalam Magister Agribisnis Fakultas Pertanian UPN



“Veteran” Yogyakarta (2022). Aktif melakukan Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat lingkup Perekonomian dan Pembangunan

Eko Murdiyanto, Lahir di Yogyakarta, 6 Maret

1970. Staf Pengajar Jurusan Agribisnis, Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta. Memperoleh gelar SP dari Sosek Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta (1995); gelar M.Si. dalam Sosiologi Perdesaan dari IPB Bogor (2001), dan gelar Dr dalam Penyuluhan



Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat dari UNS Surakarta (2017). Aktif meneliti dan menulis tentang Sosiologi Perdesaan, UMKM, Perubahan Sosial, Komunikasi dan informasi Pertanian, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Budiarto, Lahir di Magelang 18 April 1962.

Staf Pengajar pada Fakultas Pertanian UPN

“Veteran” Yogyakarta, mendapat gelar Ir.

dari Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian UPN

“Veteran” Yogyakarta (1986); gelar Magister

Pertanian (M.P.) dari Ekonomi Pertanian

UGM Yogyakarta (1996) dan gelar Dr. dalam

Ilmu-Ilmu Pertanian di UGM Yogyakarta. Aktif menulis artikel

di berbagai Jurnal Ilmiah dan Penelitian terkait Sosial Ekonomi

Pertanian.

